

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BANTUAN BERAS MISKIN
DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Reny Tri Agustina Lestari

NIM : 214105030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BANTUAN BERAS MISKIN
DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Reny Tri Agustina Lestari

NIM : 214105030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BANTUAN BERAS MISKIN
DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh :

Reny Tri Agustina Lestari

NIM : 214105030034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Mashudi, S.E.I., M.E.I.

NUP. 201603134

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BANTUAN BERAS MISKIN
DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

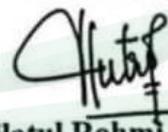
Tim Penguji

Ketua



Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 197806122009122001

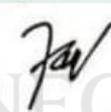
Sekretaris



Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sv., M.E.
NIP. 199209142020122011

Anggota :

1. Dr. H. M.F.Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. ()

2. Mashudi, S.E.I., M.E.I. ()

Menyetujui

Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



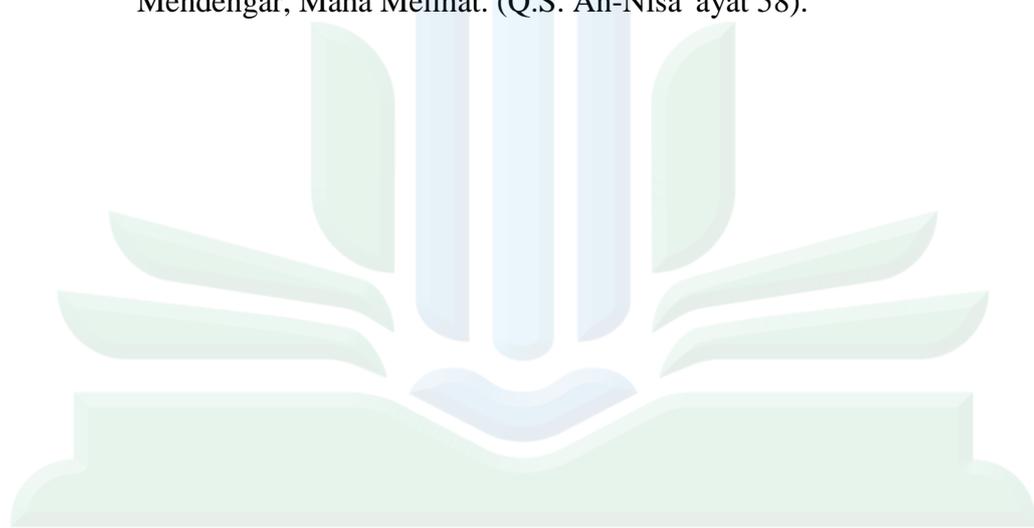
Dr. H. Baidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' ayat 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019).

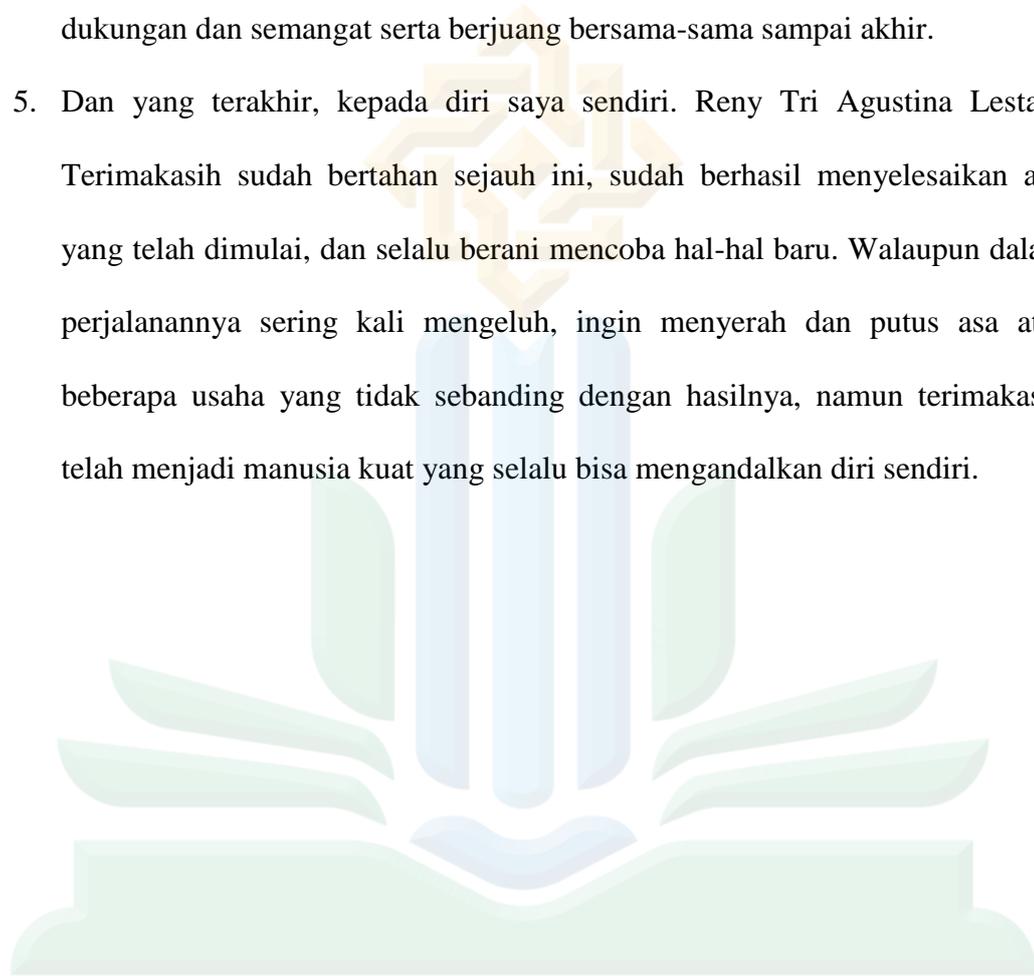
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunianya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Perjalanan hingga sampai saat di titik ini tentu tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang-orang tercinta yang senantiasa menjadi sumber semangat dan motivasi. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Adi Sutrisno dan Ibu Sugiyanti, Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadikan suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak dari buruh gandum tembakau ini bisa menjadi sarjana.
2. Kakek saya Sipur, Kakak tercinta Joni dan Ratih yang telah senantiasa memberikan doa dukungan agar tidak menyerah dalam menyelesaikan kuliah hingga sampai di titik ini.
3. Sahabat penulis yaitu Rizti, Rahmi, Sasi yang telah menjadi sahabat penulis dari sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, saling membantu ketika mengalami kesusahan, sering membuat penulis tertawa dan merasa senang ketika berkumpul bersama.

4. Teman-teman Akuntansi Syariah 5 angkatan 2021 yang memberikan dukungan dan semangat serta berjuang bersama-sama sampai akhir.
5. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Reny Tri Agustina Lestari. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya sang pencipta langit dan bumi seisinya, yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dengan judul skripsi **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”**.

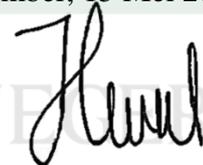
Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui skripsi ini.
5. Mashudi S.E.I., M.E.I. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Nadia Azalia Putri, M.M. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait akademik.
7. Mohamad Sholeh, Dody Sunarso, Badrus Samsi dan keluarga besar pegawai kantor desa serta warga Desa Lojejer yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi pembaca.

Jember, 15 Mei 2025



Reny Tri Agustina L
NIM. 214105030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Reny Tri Agustina Lestari, Mashudi, 2025 *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Bantuan Beras

Kemiskinan yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial yang memberikan beras kepada keluarga miskin adalah salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah. Desa Lojejer adalah desa dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Wuluhan. Namun, ada beberapa masalah yang terjadi selama pelaksanaan program, seperti penerimaan bantuan yang tidak konsisten, sasaran yang tidak tepat, dan kurangnya informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan menjadi penting untuk dikaji.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fokus masalah penelitian adalah 1) bahwa pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer tidak berjalan dengan baik dan ditemukan kendala bahwa proses pendataan tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala akibatnya proses bantuan beras tidak kompeten. 2) Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer belum sepenuhnya dilaksanakan. Informasi terkait bantuan belum terbuka kepada masyarakat. Untuk akuntabilitasnya dalam pengelolaan bantuan beras ini juga belum maksimal. Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat belum sepenuhnya dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan dan tanggung jawab.

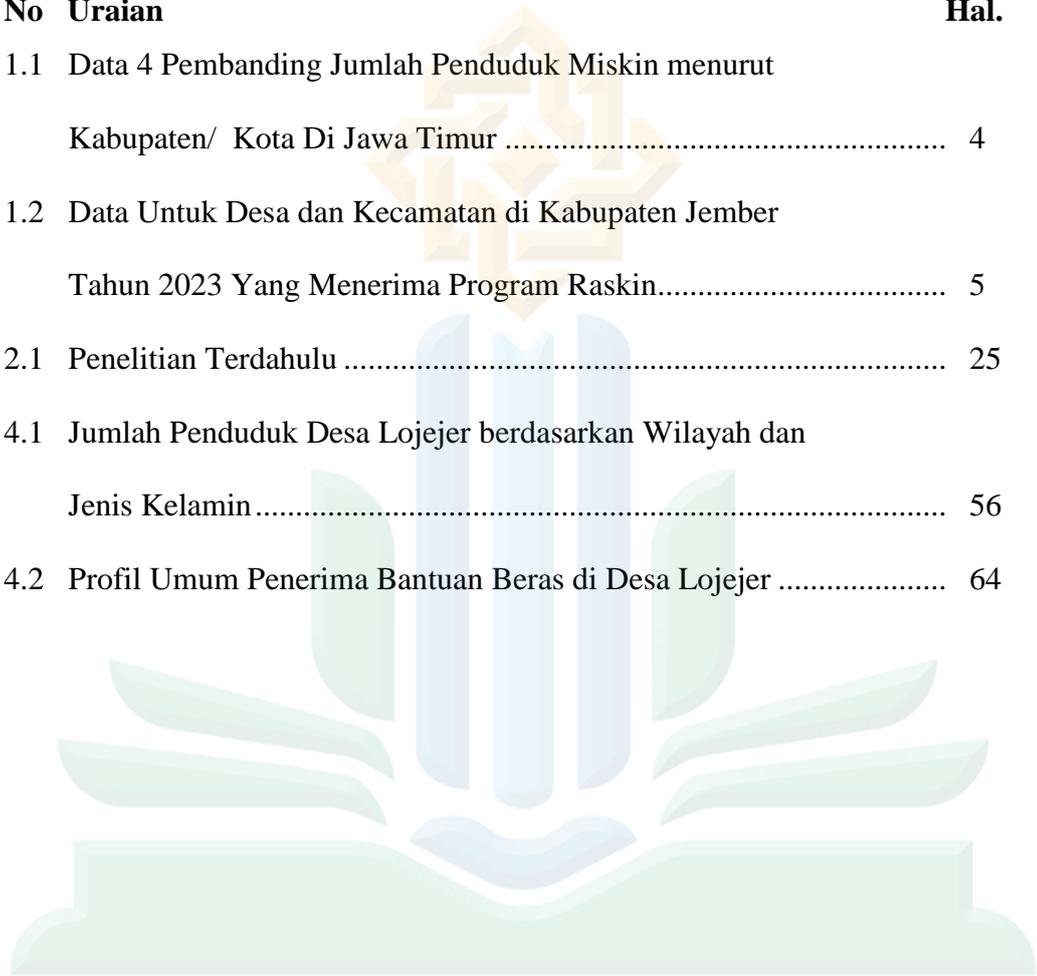
DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	30
1. Akuntabilitas	30

2. Transparansi.....	34
3. Pengelolaan Beras Miskin (Raskin).....	37
4. <i>Spiritual accounting</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-Tahap Lapangan	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Hasil Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	96
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

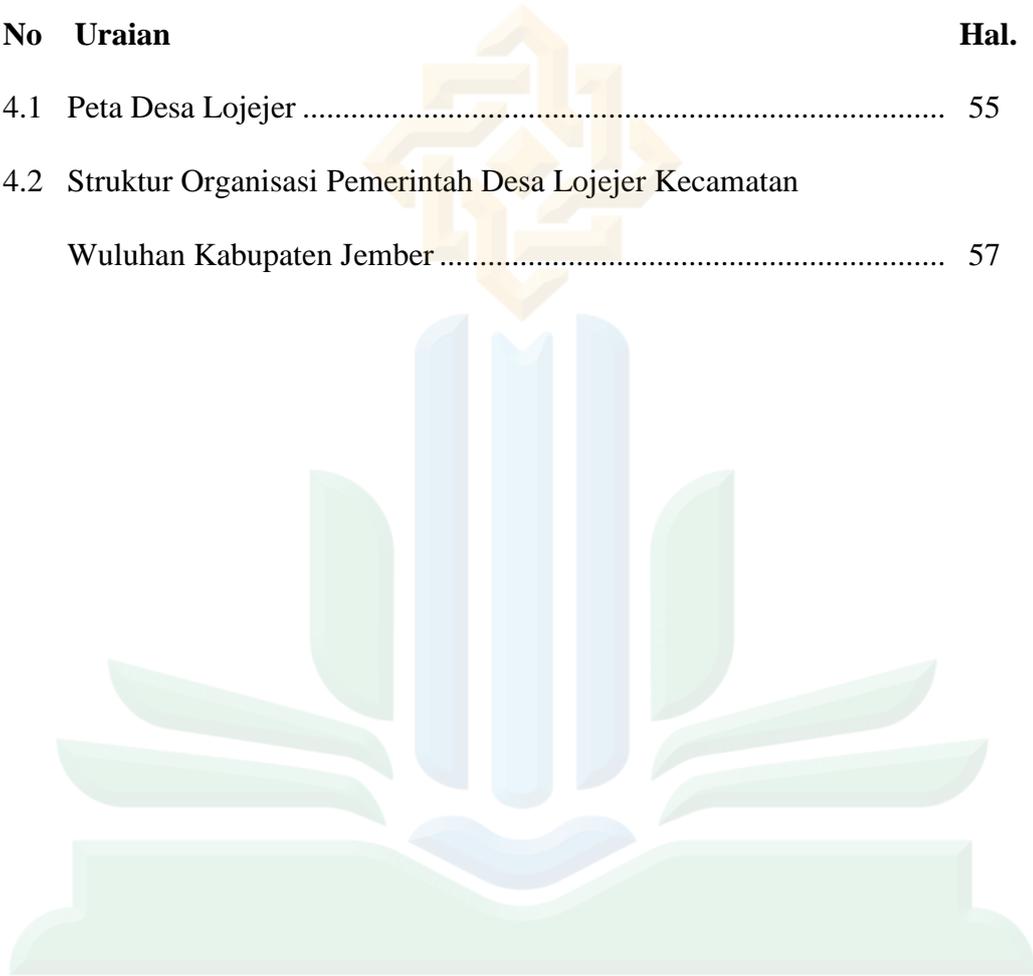
No	Uraian	Hal.
1.1	Data 4 Pembandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur	4
1.2	Data Untuk Desa dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2023 Yang Menerima Program Raskin.....	5
2.1	Penelitian Terdahulu	25
4.1	Jumlah Penduduk Desa Lojejer berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin.....	56
4.2	Profil Umum Penerima Bantuan Beras di Desa Lojejer	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Peta Desa Lojejer	55
4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ini adalah negara yang berkembang yang di mana mampu menjaga pertumbuhan ekonominya ditengah-tengah ancaman resesi global. Situasi ini mendorong Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia dibangun melalui pembangunan nasional. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan jujur, sementara transparansi mendorong keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ini selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan di negara berkembang. Jumlah besar orang Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan masih ada di Indonesia.²

Kemiskinan ini adalah masalah laten yang selalu ada di masyarakat, terutama di Indonesia. Ini adalah masalah terbesar di dunia sepanjang sejarah. Tingkat kemiskinan Indonesia ini setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan ini, bagaimanapun tidak signifikan. Agar setiap orang di Indonesia tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan, kekayaan sumber

² Alma Yulia et al., "Analisis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)," *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children* 1, no. 1 (July 31, 2023), 43, <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i1.2023.250>.

daya alam Indonesia seharusnya dimanfaatkan dengan baik.³

Saat ini, kemiskinan dan kekurangan pangan di Indonesia, terutama di Kabupaten Jember, harus ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif dari kemiskinan menyebar (*multiplier effect*) ke seluruh masyarakat. Kemiskinan dapat menghancurkan harapan generasi muda Indonesia untuk masa depan. Bagaimana generasi muda dapat membayangkan masa depan yang cerah jika mereka dihantui oleh pilihan antara makan atau tidak besok.

Kerawanan pangan terutama disebabkan oleh kemiskinan. Beras adalah makanan pokok hampir setiap orang di Indonesia. Pemerintah harus menyediakan pasokan beras yang mencukupi untuk konsumsi sehari-hari rakyatnya dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Namun, masih ada masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena jumlah orang di Indonesia yang mampu membeli beras dengan harga pasar normal masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak masyarakat masih berpenghasilan rendah, yang berdampak pada daya beli mereka untuk kebutuhan makanan.⁴

Dari permasalahan ini banyak masyarakat yang kurang mampu mengalami kekurangan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial. Salah satunya Bantuan Beras

³ Julianti, Muhammad Salim, and Nurliani, "Efektivitas Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Pada Rumahtangga Miskin Di Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa," *Jurnal, Agribisnis. Umi.Ac.Id* 3 (2020).

⁴ Elsa Widia and Yosi Safri Yetmi, "Kontribusi Program Bantuan Raskin Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Indonesia Menggunakan Metode Propensity Score Matching (PSM) Kasus IFLS 5" 28 (2022), 29.

untuk Keluarga Miskin (Raskin), yang sekarang dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan langsung berupa beras, yang merupakan kebutuhan pokok mayoritas orang Indonesia.

Program penyaluran beras rakyat miskin ini merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 yang disebut dengan program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 dikenal dengan program beras rakyat miskin (raskin). Pada tahun 2008 dirubah menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (miskin). Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Pemilik Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan bersubsidi didistribusikan langsung oleh bulog ke titik distribusi (TD) sekaligus menjadi titik bagi (TB) yang berada dirumah hukum tua di desa, kemudian disalurkan langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima bantuan.⁵

Raskin ini adalah program yang dimana tidak tersedia untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh, namun hanya ada untuk beberapa masyarakat yang sangat miskin dan rawan pangan di tempat-tempat tertentu. Data keluarga miskin dan rawan pangan diperoleh dari berbagai sumber, seperti kelurahan, terutama sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Agar program raskin berhasil, kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah harus bekerja sama, sinkronisasi, dan harmonisasi. Dimulai dengan perancangan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi dilakukan berdasarkan gagasan

⁵ Samsul Antuala, Asda Rauf, and Yuliana Bakari, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Distribusi Raskin Di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo," *Jurnal Ilmiah Agribisnis* 6 (2021), 14.

bahwa raskin adalah hak orang kurang mampu. Semua orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin harus mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diterapkan oleh BPS, berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka. Kebijakan program dibuat oleh pemerintah pusat.⁶

Berikut data untuk jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial berupa beras di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa :

Tabel 1. 1
Data 4 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
	2022	2023	2024
Kab. Jember	232,73	236,46	224,77
Pacitan	76,93	76,20	73,03
Trenggalek	76,75	74,58	73,75
Ponorogo	81,80	83,71	80,05

Sumber : BPS, Jawa Timur

Dari data diatas Kabupaten Jember menduduki jumlah kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagai data perbandinganya di Kabupaten lainnya yang angka kemiskinanya cukup stabil yaitu dengan menurun di tiap tahunnya. Meskipun Kabupaten Jember berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Timur.

⁶ Sarmila Sarmila, Udin B. Sore, and Natsir Tompo, "Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar," *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 1, no. 1 (January 30, 2022): 14–21, <https://doi.org/10.56326/jp.v1i1.1371>.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menurunkan beberapa bantuan sosial salah satunya bantuan berupa beras untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin sekaligus peningkatan penahanan pangan. Penelitian ini memfokuskan pada Kabupaten Jember, dengan alasan bahwa Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Untuk mendapat data yang lebih spesifik, penelitian akan dipersempit ke salah satu kecamatan di Kabupaten Jember. Sebagai informasi, Kabupaten Jember memiliki beberapa kecamatan dengan jumlah desa yang cukup banyak serta mendapatkan bantuan sosial berupa beras yang cukup banyak juga. Berikut untuk data-datanya :

Tabel 1. 2
Data Untuk Desa Dan Kecamatan Di Kabupaten Jember
Tahun 2023 Yang Menerima Program Raskin

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jatah Beras Raskin (Kg)	Rumah Tangga Miskin (RTS-PM)
1.	Rambipuji	5	4751	47510
2.	Silo	6	5217	52170
3.	Puger	6	5272	52720
4.	Wuluhan	7	5401	54010

Sumber : BPS, Kabupaten Jember

Kecamatan Wuluhan yang memiliki jumlah penerima paling tinggi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemilihan Kecamatan Wuluhan sebagai penerima bantuan yang paling banyak daripada kecamatan lainnya diantaranya yaitu jumlah desanya yang cukup banyak menerima bantuan beras yaitu dengan total 5401 kg jatah beras yang tersalurkan di 7 desa untuk bantuan

orang tidak mampu di Kecamatan Wuluhan tersebut. 7 desa tersebut diantaranya :

1. Desa Tanjungrejo dengan 622 KPM dan tersalurkan 622 KPM
2. Desa Kesilir dengan 772 KPM dan tersalurkan 722 KPM
3. Desa Tamansari dengan 1.103 KPM dan tersalurkan 1.103 KPM
4. Desa Glundengan dengan 1.235 KPM dan tersalurkan 1.235 KPM
5. Desa Ampel dengan 1.323 KPM dan tersalurkan 1.323 KPM
6. Desa Dukuhdempok dengan 756 KPM dan Tersalurkan 756 KPM
7. Desa Lojejer dengan 1.531 KPM dan Tersalurkan 1.531 KPM

Data diatas adalah penerima dan total jatah beras di tahun 2024 yang di bagikan di 7 desa yang ada di Kecamatan Wuluhan. Desa Lojejer ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang menerima bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan yang total penerimanya paling banyak yaitu 1.531 KPM. Jumlah ini menunjukkan skala distribusi yang besar dan kompleks, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi semakin penting.

Beras yang disubsidi didistribusikan langsung oleh bulog ke titik distribusi (TD) dan titik bagi (TB) di rumah hukum tua Desa Lojejer. Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima bantuan kemudian diberikan langsung kepadanya. Namun dari hasil observasi yang saya lakukan Desa Lojejer lah dengan jumlah KPM terbanyak dan memiliki permasalahan yang dimana warganya tidak konsisten mendapat jatah beras di setiap bulanya. Masih ada beberapa orang-orang yang kurang mampu tidak tercatat dan tidak

mendapatkan bantuan beras gratis sehingga mereka kesulitan untuk makan. Bahkan masyarakat yang tergolong menengah, mampu, dan yang tidak termasuk dalam kategori miskin justru mendapatkan bantuan tersebut daripada orang yang membutuhkan. Selain itu, informasi terkait syarat penerimaan bantuan sering kali tidak jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan bantuan ini. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan beras juga menjadi salah satu sorotan penting, dimana pihak pengelola tidak selalu memberikan laporan secara terbuka terkait pengelolaan bantuan Raskin ini.⁷

Sebagai perbandingan, penelitian oleh Pratiwi dkk. Tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses penyewaan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang tertib mulai dari pengajuan hingga pembayaran dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Meskipun konteksnya berbeda, yaitu pengelolaan aset BUMN, temuan tersebut memperkuat pentingnya sistem yang rapi dan transparan juga dalam pengelolaan bantuan beras dari pemerintah di tingkat desa. Tanpa adanya sistem yang jelas, potensi penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan sangat mungkin terjadi.⁸

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Juwita Nur Radeana dkk.

⁷ Bambang Sutikno, "Analisis Efektivitas Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 15 (2020), 2, <https://doi.org/10.62128/jiads.v15i16.10>.

⁸ Ana Pratiwi et al., "Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Proses Pembuatan Kontrak Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember," *Penamas: Journal of Community Service* 3, no. 1 (June 30, 2023):<https://doi.org/10.53088/penamas.v3i1.604>.

Tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian *good governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Bahwa dalam pengelolaannya masih kurang maksimal, akuntabilitas belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan dan keterbukaan terkait pengelolaan bantuan sosial tersebut masih kurang dan belum dijalankan.⁹

Dalam pengelolaan Raskin, transparansi berarti bahwa masyarakat dan pelaku Raskin di desa lokasi Raskin harus tahu, memahami, dan mengerti adanya Raskin dan kegiatan tersebut. Ini berarti bahwa informasi harus tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan.¹⁰

Akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau organisasi yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik harus memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Secara sederhana, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati, setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat dan semua

⁹ Juwita Nur Radeana et al., "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance," *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (October 1, 2024): 206–20, <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

¹⁰ "Petunjuk Teknis Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kabupaten Rembang Tahun 2007" (Kabupaten Rembang, 2007).

pihak yang berwenang.¹¹

Pemerintah desa di seluruh Indonesia seharusnya bekerja sama dengan program pemerintah pusat seperti bantuan beras miskin untuk orang miskin. Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, anggaran setiap desa harus dikelola dengan baik. Pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah desa harus mematuhi prinsip-prinsip ini dan secara teratur memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa atas tindakannya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud ini dalam manajemen bantuan beras miskin sejalan dengan prinsip akuntansi spiritual. Konsep dasar yang sama bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengelola bantuan beras miskin karena tanggung jawab ini ditanggung oleh masyarakat umum dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat.¹²

Untuk menganalisis transparansi dan tanggung jawab berdasarkan akuntansi spiritual. Akuntansi ini menekankan bahwa pengelolaan bantuan sosial tidak hanya didasarkan pada pertimbangan material, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Akuntansi spiritual mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebersamaan, keseimbangan, kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan dalam

¹¹ Asnita A, "Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024).

¹² Yeni Nurisma, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

setiap bentuk pengelolaan, termasuk pengelolaan bantuan sosial. Dengan menerapkan akuntansi ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bantuan beras di Desa Lojejer dikelola dan sejauh mana pengelolaannya sesuai dengan prinsip moral dan spiritual yang diharapkan.¹³

Pengelolaan bantuan yang tidak transparan dan tidak akuntabel akan memberikan pengaruh buruk yaitu menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer, dan juga untuk menemukan komponen yang memengaruhi distribusi yang tidak sesuai dan tidak konsisten. Desa Lojejer yang terletak di Kecamatan Wulhan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu desa yang menerima program penyaluran beras miskin dengan jumlah terbanyak. Pasti banyak masalah yang terjadi selama proses pembagian beras miskin ini daripada desa lainnya.¹⁴ Oleh karena itu, untuk memecahkan dan meneliti

masalah tersebut agar nantinya proses bantuan sosial non pangan berupa pembagian beras miskin ini berjalan lebih konsisten peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut dengan melakukan penelitian

berjudul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wulhan Kabupaten Jember”**.

¹³ Gama Marwah, “Akuntansi Sebagai Realitas : Spiritual Accounting Dalam Paradigma Naturalistik (Studi Pada PT Biota Laut Ganggang)” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2020).

¹⁴ Rambu Riniati Lomi, “Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) (Studi Di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)” (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, 2023).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian yang ingin peneliti bahas yaitu :

1. Bagaimana sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan bantuan sosial, serta dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai bidang ilmu akuntansi spiritual

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial serta menambah wawasan peneliti tentang akuntansi spiritual.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan panduan praktis untuk meningkatkan pengelolaan bantuan beras miskin agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup definisi istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah orang salah memahami arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵

Adapun istilah-istilah yang dimaksud diatas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi berarti berbagi informasi penting dan bermanfaat

¹⁵ *Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember, UIN KHAS Jember Press, 2021, n.d.), 45.*

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara yang mudah diakses dan difahami. Untuk memastikan bahwa informasi tidak disembunyikan atau sulit dipahami oleh masyarakat, pemerintah harus menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan secara jelas dan dapat diterima sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁶

Dalam perihal ini masyarakat memiliki keterbukaan dan hak atas memahami proses pengelolaan bantuan karena ini berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang penting bagi banyak orang.¹⁷ Dalam konteks akuntansi spiritual, transparansi berarti tidak hanya memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan bantuan, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi mencerminkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana bantuan dikelola dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan etika dan keadilan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan sosial dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal ini, akuntabilitas adalah ukuran penting untuk menilai

¹⁶ Rizky Arief Fadhillah, Kamillah, and Mawaddah Irham, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (January 28, 2024): 38–47, <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>.

¹⁷ Dra. Ratih Rakhmawati, Dwi Oktavia Ariyanti, and Wiwik Fitria Ningsih, "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah" 1 (2023): No 1.

bagaimana pemerintah mengelola bantuan sosial, seperti beras miskin.¹⁸

Akuntabilitas dalam kerangka akuntansi spiritual merujuk pada tanggung jawab pengelola untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan spiritual.

3. Pengelolaan Bantuan Beras Miskin

Pengelolaan bantuan beras miskin merupakan proses perencanaan, distribusi, dan pengawasan bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Program bantuan beras miskin ini dikelola di pemerintah pusat dan kemudian disalurkan melalui pemerintah daerah ke masyarakat yang dianggap memenuhi sebagai penerima raskin. Raskin ini disalurkan bukan berupa dana namun dari pemerintah langsung berupa fisik yaitu beras yang dimana diterima langsung oleh masyarakat yang sedang membutuhkan.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan pembahasan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁰ Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini memberikan dasar gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas. Pendahuluan terdiri dari 6 bab terpisah : konteks

¹⁸ Juwita Nur Radeana et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance,” *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (October 1, 2024): 206–207, <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

¹⁹ La Manguntara, “Efektivitas Pengelolaan Program Beras Sejahtera Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna,” *Nautical, Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia* 1 (2022), <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i8.414>.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 89.

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini memberikan penjelasan tentang penelitian sebelumnya dan kajian teori yang relevan dengan skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini memberikan rincian tentang metode penelitian yang digunakan. Ini termasuk metode yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang digunakan, yang mencakup analisis dan validasi data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, Bab ini membahas objek penelitian, bagaimana data disajikan dan dianalisis, dan bagaimana hasilnya dibahas.

BAB V Penutup, Bab ini mencakup kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang direkomendasikan. Kesimpulan menyajikan poin-poin yang diperoleh dari analisis data yang disajikan dan diuraikan secara ringkas. Saran mencakup tindakan yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan dari penelitian tersebut, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Dengan melakukan langkah ini, akan menjadi mungkin untuk menentukan seberapa orisinal dan posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Elok Rizki Aliffia, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.²¹ Pada penelitian ini dilakukan di desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa apakah sudah transparan dan sudah di pertanggungjawabkan atau belum. Dan fokus dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana sistem pengelolaan dana desa sumberejo pada tahun 2022, serta bentuk transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Metode yang digunakan untuk meneliti ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan langsung atau *field research*. Hasil dari

²¹ Elok Rizky Aliffia, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

penelitian ini yaitu dimana dalam sistem pengelolaan dana desanya mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 serta mengacu juga pada peraturan pada Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ini sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk transparansinya belum berjalan dengan maksimal karena pengelolaan keuangan desa ini hanya di publikasikan lewat banner saja bukan dengan website yang lengkap karena belum dimiliki pemerintah desa Sumberejo.

2. Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, dan Agustin Dwi Haryanti, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*”, 2024.²² Penelitian ini dilakukan di Desa Sentul Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang dimana dapat mengetahui pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus, untuk memecahkan masalah peneliti ini melakukan wawancara dengan pemerintah desa dan warga setempat. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan bantuan langsung tunai di desa tersebut sudah menerapkan asas akuntabilitas namun untuk *good governance* nya belum sepenuhnya diterapkan karena prinsip keterbukaan belum dijalankan. Selain itu permasalahan juga terjadi timbul akibat kuota

²² Juwita Nur Radeana et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance.”

bantuan semakin tahun semakin sedikit sehingga menimbulkan pengelolaan yang kurang maksimal.

3. Diah Puji Lestari, “Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Rezti’s Batik Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.²³ Pada penelitian ini dilakukan di desa Tegalsari yang berada di kecamatan Ambulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu yang dimana fokus terhadap pengelolaan keuangan yang diterapkan di Rezti’s batik dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di Rezti’s batik ini. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu yang dimana untuk pengelolaan keuangan untuk pencatatanya di Rezti’s batik belum menggunakan satu pencatatan. Ada tiga cara untuk mencatat pekerjaan karyawan. Pekerjaan dicatat secara manual dalam buku warung, konsumsi perusahaan dicatat menggunakan Microsoft Excel, dan pencatatan menggunakan aplikasi SiApik. Aplikasi SiApik menghasilkan laporan keuangan, yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap tiga bulan sekali. Untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Rezti’s batik ini dengan berbagai macam pencatatan dan pelaporan masih belum dipertanggungjawabkan dengan baik. Serta di Rezti’s batik ini lebih mengutamakan kepuasan pelanggan.

²³ Diah Puji Lestari, “Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Rezti’s Batik Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

4. Siswanto Diki, “Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covi 19 Di Kecamatan lamasi Kabupaten luwu”, 2022.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Variabel independen yang digunakan adalah transparansi keuangan desa, sedangkan untuk variabel dependennya yang digunakan adalah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana, dengan tambahan uji validasi dan uji reliabilitas. Metode sumpling purposive digunakan untuk mengambil sampel. Dalam penelitian ini, responden adalah anggota staf desa dan beberapa kelompok masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, totalnya 75 orang, dan alat yang digunakan untuk mengelola data SPSS type 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19.
5. Ihsanul Windasari, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam”, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah,

²⁴ Siswanto Diki, “Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covi 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022).

2024.²⁵ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren yang terletak di salah satu daerah Lawang, Kabupaten Malang. Selain itu ada tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk menemukan konsep yang sesuai dalam menerapkan ilmu akuntansi dalam pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pengelolaan keuangannya sudah dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga amanah. Pengurus dalam pengelolaan keuangannya juga menyeimbangkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan ini dilakukan supaya menumbuhkan budaya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Serta keterbukaan juga sudah terbuka dan mendapat persetujuan dari kyai, pemimpin organisasi dan pemberi amanah lainnya.

6. Tiwi Bastari Batubara, Yenni Samri Juliati Nasution, Nursantri Yanti, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, 2023.²⁶ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah serta sudah penerapan akuntabilitas dan transparansinya. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian di dana bantuan operasional sekolah Smp Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten

²⁵ Ihsanul Windasari, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol. 1 (2024), <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.

²⁶ Tiwi Bastari Batubara, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal,” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 12, no. 2 (June 28, 2023): 138, <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>.

Mandailing Natal pada tahun 2021/2022. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pengelolaan dana bos sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan BOS, komite, dan guru dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun ajaran 2021/2022 dan juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Untuk akuntabilitasnya juga sudah di terapkan sesuai dengan permendikbud tersebut dengan baik. Namun untuk transparansinya belum berjalan dengan baik karena tidak ada keterbukaan kepada wali murid penerima bantuan dana bos tersebut terkait anggaran yang diperoleh serta untuk realisasi penggunaan dana bos hanya memajang papan informasi sesuai dalam dalam Permendikbud No 18 Tahun 2019.

7. Ahmad Irfansyah, Candra Romanda, dan Rano Asoka “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin”. 2023.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data yaitu data primer dan sekunder yang di dapat dari observasi langsung berupa laporan realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan juga melakukan wawancara. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di kantor camat tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk pengelolaan keuangan di kantor camat tersebut sudah bisa dikatakan akuntabel serta transparan

²⁷ Ahmad Irfansyah, Candra Romanda, and Rano Asoka, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 6, no. 2 (July 9, 2023): 236, <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i2.288>.

dan juga disiplin. Namun untuk pengelolaanya memiliki kendala berupa jaringan. Selain itu untuk setiap akhir periode pada laporan keuangan di kantor ini selalu dilakukan pengauditan untuk menghindari salah pencatatan ataupun penyelewengan dana.

8. Ristiana, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya), 2022.”²⁸ Tujuan dari penelitian ini yaitu apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa serta partisipasi masyarakat memoderasi apakah berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode random sampling dan sampel yang diperoleh berjumlah 83 responden dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dengan MRA. Uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Penelitian ini memiliki hasil bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dalam pengelolaan dana desa sedangkan untuk partisipasi masyarakat tidak memoderasi transparansinya juga berpengaruh di pengelolaan dana desa sidokare. Dan untuk variabel partisipasi masyarakat

²⁸ Ristiana, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya)” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2022).

moderasi akuntabilitasnya berpengaruh terhadap pengelolaan.

9. Zefri Maulana, Nasrul Kahfi Lubis, “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan”. 2020.²⁹ Dalam penelitian ini memiliki tujuan supaya bisa membuktikan adakah pengaruh transparansi dalam pelaporan keuangan terhadap kualitas dalam pelaporan keuangan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan populasi 70 orang. 70 orang ini adalah pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sampel yang digunakan juga memakai metode *non probability sampling* berdasarkan sampel kebetulan dan orang yang mengembalikan kuisisioner berjumlah 57. Data ini diolah menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS. Penelitian ini memiliki hasil bahwa transparansi ini berpengaruh dalam pengelolaan pelaporan keuangan serta kualitasnya setelah melakukan uji menggunakan *software* SPSS.

10. Dina Rastuti, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”, 2023.³⁰ Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD tersebut. Metode

²⁹ Zefri Maulana and Nasrul Kahfi Lubis, “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 4, no. 1 (October 11, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2660>.

³⁰ Dina Rastuti, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk transparansinya berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 sudah cukup transparan dan juga akuntabel. Namun untuk akuntabilitasnya belum maksimal dikarenakan program-program pembangunan desa ada yang belum terlaksana, memiliki keterlambatan dalam pembuatan laporan serta kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban dalam administrasi.

11. Fauzan dan Nurul Setianingrum “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember”,2023.³¹ Penelitian ini dilakukan di berbagai sekolah khususnya di daerah Jember. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer dan sekunder berupa observasi pengumpulan data dari hasil mengamati. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan melalui teknik wawancara *in dept interview* ditemukan bahwa Pengelolaan Dana Bos di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah dijalankan sesuai peraturan pemerintah dan pada pendistribusiannya tidak terdapat hambatan yang berat.

12. Agus Arwani, Stenly Salenus, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz,

³¹ Fauzan and Nurul Setianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 9, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.

Andiyan Andiyan, “*The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution*” diterbitkan dalam jurnal *International Journal of Professional Business Review* pada tahun 2022.³²

Metode yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan studi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat telah menyalurkan zakat produktif secara tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik, meskipun ada beberapa hambatan, seperti kekurangan modal dan pengawasan.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu persamaanya objek sama-sama menyangkut distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Perbedaanya penelitian terdahulu membahas zakat produktif sebagai modal usaha, sementara penelitian sekarang membahas bantuan beras yang bersifat konsumtif.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Elok Rizki Aliffia, 2024, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.	Persamaanya sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi, metode yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif.	Untuk perbedaanya terletak pada subjek dan objek penelitiannya yang dimana penelitian terdahulu meneliti pengelolaan keuangan di Desa Sumberejo dengan jenis penelitian metode kualitatif

³² Agus Arwani et al., “The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution,” *International Journal Of Professional Business Review*, 2022.

			<i>field research</i> sedangkan untuk penelitian yang sekarang meneliti tentang pengelolaan bantuan sosial berupa beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
2.	Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, dan Agustin Dwi Haryanti, 2024, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> ".	Persamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial dan metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif.	Untuk perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakan yang dimana penelitian sekarang meneliti pada bantuan beras miskin di desa Lojejer sedangkan penelitian terdahulu meneliti pengelolaan bantuan langsung tunai di desa Sentul Kabupaten Pasuruan.
3.	Diah Puji Lestari, 2024, Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Rezti's Batik Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu.	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya akuntabilitas di setiap pengelolaan. Serta metode yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.	Untuk perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian yang dimana penelitian terdahulu meneliti pada UMKM di Rezti's batik desa Tegalsari, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti pada pengelolaan bantuan beras miskin di desa Lojejer.
4.	Siswanto Diki, 2024, Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu pada pembahasan terkait transparansi terhadap pengelolaan bantuan dari desa.	Perbedaannya yaitu metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif, pada penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

	Pandemi Covi 19 Di Kecamatan lamasi Kabupaten luwu.		
5.	Ihsanul Windasari, 2024, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam.	Persamaan dengan penelitian yang sekarang meneliti pentingnya akuntabilitas dan transparansi di setiap pengelolaan serta di hubungkan ke prespektif syariah, metode yang digunakan juga sama metode kualitatif.	Perbedaanya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren sedangkan penelitian yang sekarang di bantuan beras miskin dari desa.
6.	Tiwi Bastari Batubara, Yenni Samri Juliati Nasution, Nursantri Yanti, 2023, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.	Persamaan terletak pada metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif serta membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu di subjek dan objek penelitiannya yang dimana penelitian terdahulu meneliti pengelolaan dana bos di SMP Negeri 3 Natal Kabupaten Mandailing sedangkan yang sekarang meneliti pengelolaan bantuan beras miskin di desa Lojejer Kecamatan Wuluhan.
7.	Ahmad Irfansyah, Candra Romanda, dan Rano Asoka, 2023 “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin”.	Persamaan dengan penelitian yang sekarang menganalisis akuntabilitas dan transparansi dan juga metodenya kualitatif.	Untuk perbedaanya terletak pada subjek yang diteliti dimana penelitian terdahulu meneliti di pengelolaan keuangan pada kantor camat dan yang sekarang meneliti di bantuan beras miskin desa.
8.	Ristiana, 2022 , Pengaruh	Variabel yang sama membahas akuntabilitas	Perbedaanya terletak pada metode yang

	<p>Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang).</p>	<p>dan transparansi.</p>	<p>digunakan metode yang terdahulu menggunakan kuantitatif dengan pengambilan sampel. Serta objek dan subjek yang diteliti juga beda terdahulu meneliti Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare) penelitian sekarang meneliti pengelolaan dana bantuan beras miskin di desa Lojejer.</p>
9.	<p>Zefri Maulana, Nasrul Kahfi Lubis, 2020, "Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.</p>	<p>Persamaanya yaitu sama-sama Membahas transparansi.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu hanya meneliti transparansi dalam pengelolaan sedangkan yang sekarang meneliti transparansi juga akuntabilitasnya. Metodenya juga berbeda yang sekarang menggunakan kualitatif dan yang terdahulu menggunakan kuantitatif. Objek juga berbeda yang terdahulu objeknya pada pelaporan keuangan yang sekarang pada pengelolaan bantuan beras miskin.</p>

10.	Dina Rastuti, 2023, <i>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.</i>	Menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif.	Untuk perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yang dimana terdahulu meneliti bagian ADD di Desa Rantau Jaya Udik II untuk penelitian yang sekarang meneliti pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer.
11.	Fauzan dan Nurul Setianingrum 2023, <i>Implementasi Pengelolaan Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jember</i>	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti bagaimana bantuan dari pemerintah dikelola oleh instansi atau pihak terkait (Dana BOS oleh Dinas pendidikan, bantuan beras oleh pemerintah desa). Kedua penelitian menyoroti pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Untuk perbedaannya penelitian terdahulu meneliti Dana Bos (anggaran pendidikan untuk sekolah) kalau penelitian sekarang meneliti bantuan beras dari pemerintah (bantuan sosial pangan).
12.	Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, Andiyan Andiyan, <i>“The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution”</i>	Persamaannya objek yang dibahas sama-sama bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama menekankan pentingnya akuntabilitas dan monitoring dalam pengelolaan.	Jenis bantuan yang diteliti berbeda penelitian terdahulu membahas zakat sedangkan sekarang membahas bantuan beras. Wilayah penelitian berbeda dan juga fokus penelitian yang diteliti juga berbeda.

Sumber : Diolah Peneliti

B. Kajian Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Dalam Buku Manajemen Pemerintahan Daerah karya Hendrawati Hamid menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua lembaga pemerintah, badan, dan lembaga negara di pusat dan daerah harus memahami luasnya akuntabilitas, sesuai dengan tugas pokok mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi termasuk dalam lingkup akuntabilitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai semua aspek tingkah laku seseorang. Ini mencakup perilaku pribadi, yang disebut sebagai akuntabilitas spiritual, dan perilaku eksternal yang disebut sebagai akuntabilitas sosial.³³

Dalam penelitian ini menggunakan akuntabilitas spiritual. Iwan Triuwono menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek formal dan administratif, tetapi juga mencakup dimensi vertikal dan horizontal : kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri.

Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab tidak hanya bersifat duniawi

³³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama (Garis Khatulistiwa Makassar, 2020), 138.

tetapi juga ukhrawi.³⁴

b. Indikator Akuntabilitas

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan 4 indikator akuntabilitas publik yaitu :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam pengelolaan terkait kejujuran dan pengindaran penyalahgunaan.
- 2) Akuntabilitas proses, terkait dengan mekanisme pelaksanaan, sistem informasi, dan prosedur yang digunakan.
- 3) Akuntabilitas Program, menilai apakah program yang dilaksanakan mendukung tujuan organisasi dan berpihak pada masyarakat.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, menyangkut tanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan alasan penetapan kebijakan tersebut.³⁵

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam perspektif spiritual, Iwan Triyuwono menyebutkan beberapa prinsip akuntabilitas sebagai berikut :

1) Tauhid

Menjadikan Allah sebagai pusat perhatian dalam setiap tindakan manajemen

2) Amanah

Menjalankan tugas secara adil dan jujur sesuai dengan

³⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

³⁵ Manggaukang Raba, *Administrasi Konsep Dan Implementasi* (Malang : UMM Press, 2020), hal 33.

kepercayaan yang diberikan.

3) Ihsan

Bertindak dengan sungguh-sungguh bahkan ketika orang lain tidak mengawasinya.

4) Keadilan

Memberikan hak kepada yang berhak tanpa mempertimbangkan pihak lain.³⁶ Dalam keadilan yang dimaksud ini ada etika keadilan dalam pengelolaan bantuan sosial yang dimana bagian dari studi etika yang berfokus pada pertimbangan moral tentang distribusi yang adil dan pengaturan kehidupan sosial yang berkeadilan.³⁷ Konsep ini penting dalam pengelolaan bantuan sosial, terutama dalam hal distribusi bantuan beras agar dilakukan secara merata, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

d. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan yang harus

dipertanggungjawabkan. Secara umum, *accountability* dan *responsibility* diberikan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Manfaat akuntabilitas dalam upaya mewujudkan

sistem akuntabilitas pada organisasi meliputi :

- 1) Memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan transparansi dan respons

³⁶ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 169–198.

³⁷ Fauzan et al., *Etika Bisnis & Profesi* (Indigo Media, 2023), 44.

- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat
- 4) Meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk beroperasi dengan lebih efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan sistem penilaian yang wajar.³⁸

e. Akuntabilitas Dalam Prespektif Akuntansi Spiritual

Dalam perspektif akuntansi spiritual, akuntabilitas mencakup tanggung jawab kepada tiga hal yaitu Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Menurut akuntansi spiritual, beberapa komponen utama akuntabilitas adalah :

1) Kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan

Maksudnya disini pengelola harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan di pertanggungjawabkan kepada Tuhan jadi harus menanamkan kejujuran, keadilan, dan niat yang lurus.

2) Kepedulian kepada masyarakat

Akuntabilitas ini tidak hanya berupa laporan administratif melainkan harus memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat

3) Prinsip amanah.

³⁸ Wiwiek Kusumaning Asmoro and Novie Astuti Setianingsih, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana 'Prodamas' Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri," *Owner* 3, no. 2 (July 31, 2020): 270, <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>.

Sebagai penerima amanah, pengelolaan bantuan harus menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Transparansi

a) Pengertian Transparansi

Menurut Lukviarman Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau lembaga, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur, dan pelaksanaannya, serta informasi tentang hasil yang telah dicapai. Menurut prinsip transparansi, informasi harus diungkapkan secara akurat dan tepat waktu. Informasi yang dapat diperoleh meliputi kinerja bantuan sosial, keadaan bantuan sosial, kepemilikan, dan pengelolaan bantuan sosial. Proses yang transparan sangat penting agar pengelola bantuan sosial dan individu yang ingin memperoleh informasi dapat mengetahui keadaan sebenarnya pengelolaan bantuan sosial sehingga meningkat nilai di pemerintahan. Transparansi menganggap bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola bantuan untuk masyarakat. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Dalam pengukuran transparansi ada tiga indikator yang diperlukan yaitu: Transparansi dalam prosedur pelayanan serta peraturan yang mudah dipahami oleh para pengguna, Keterbukaan pada proses penyelenggaraan, Transparansi pelayanan dalam kemudahan memperoleh informasi yang akurat.³⁹

b) Indikator Kelemahan Transparansi :

Berikut adalah beberapa indikator kelemahan transparansi yang sering ditemukan dalam praktik pengelolaan :

1) Kurangnya keterbukaan informasi terkait pendataan penerima

³⁹ Lukviarman, *Corporate Governance. PT Era Adicitra Intermedia*, Solo Mahsun, Moh., sulistyowati F dan Purwanugraha, Heribertus A. (Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.: Akuntansi Sektor Publik, 2016).

- 2) Penyaluran tidak merata dan tidak konsisten
- 3) Tidak ada sosialisasi terbuka atau laporan publik
- 4) Keterlibatan masyarakat masih rendah
- 5) Belum adanya mekanisme laporan yang diumumkan ke publik

c) Prinsip-prinsip Transparansi

1) Terbuka

Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah berupa beras memungkinkan masyarakat umum dan banyak pihak yang terlibat.

2) Bisa diketahui oleh masyarakat luas

Pemerintah desa memberikan akses yang mudah ke masyarakat tentang bantuan sosial.

3) Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat

Keputusan yang diambil dalam pengelolaan bantuan ini secara keseluruhan terbuka dan melibatkan masyarakat

d) Konsep Transparansi Berdasarkan Akuntansi Spiritual

Akuntansi spiritual transparansi juga mencakup aspek yang lebih luas daripada sekedar keterbukaan informasi. Transparansi dalam akuntansi spiritual berarti menjadi jujur dan tulus dalam mengungkapkan informasi, serta memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cukup ke informasi tersebut. Dalam akuntansi spiritual, transparansi mencakup hal-hal berikut :

1) Keterbukaan hati (keterbukaan dalam pengungkapan)

Transparansi bukan hanya membagikan informasi, tetapi untuk melakukannya juga harus dengan niat yang tulus untuk mencapai keadilan.

- 2) Komunikasi yang jujur dan terbuka
- 3) Transparansi sebagai bentuk ibadah

Karena kejujuran adalah bagian dari ajaran agama, menyampaikan informasi dengan benar dan terbuka dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan kata lain, transparansi memiliki nilai spiritual selain administratif.⁴⁰

3. Pengelolaan Beras Miskin (Raskin)

a. Pengertian Raskin

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. “Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tangga Miskin (RTM)”. Beras miskin adalah salah satu pendekatan dalam penanganan subsidi dalam bentuk bahan pokok bersyarat dari pemerintah yang diperuntukkan oleh masyarakat yang mengalami berpendapatan rendah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pangan dengan dibawah harga pasar kepada penerima tertentu, untuk itu dapat mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin

⁴⁰ Bobby Briando et al., “Tuah Sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 (2020).

dan dapat memberikan perlindungan sosial dalam rumah tangga sasaran.⁴¹

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik vertical (pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah) maupun horizontal (lintas kementerian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin. Pelaksana distribusi beras miskin tersebut merupakan tanggung jawab dalam 2 lembaga yaitu bulog dan pemerintah daerah, bulog dapat bertanggung jawab terhadap penyaluran beras miskin tersebut hingga sampai pada titik distribusi, sedangkan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab pada pendistribusian beras miskin dari titik

⁴¹ Bulog, "Program Beras Untuk Keluarga Miskin," <http://bulog.go.id/>, h. 6., September 25, 2020.

distribusi hingga sampai tangan penerima beras miskin.⁴²

b. Mekanisme Pengelolaan Beras Miskin

1) Mekanisme pengelolaan beras miskin ini ada beberapa tahap :

- a) Bupati/wali kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasubdivreg/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga miskin yang menerima manfaat Raskin di semua kecamatan dan desa/kelurahan.
- b) Menurut SPPB/DO, satuan kerja raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum Bulog dan mengangkutnya dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Pelaksana distribusi termasuk aparat kecamatan, desa, dan kelurahan, serta TP-PKK yang dikhususkan oleh camat.
- c) Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin individu atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima.

2) Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

- a) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.
- b) Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

⁴² “Pedoman Umum (Pedum) Raskin,” 2018.

c) Rencana Penyaluran, untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d) Mekanisme Penyaluran

(1) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum Bulog.

(2) Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.

(3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.

(4) Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan

kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Pelaksanaan Distribusi.

(5) Di TD dilaksanakan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak.

(6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.⁴³

c. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Dalam Menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah:

- 1) Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
- 2) Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp.1.500.000.
- 3) Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- 4) Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian.
- 5) Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang).

⁴³ “Pedoman Umum (Pedum) Raskin,” 2018.

- 6) Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu.
- 7) Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
- 8) Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
- 9) Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus
- 10) Sumber air sumur masih menimba atau manual
- 11) Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.⁴⁴

4. *Spiritual Accounting*

Akuntansi spiritual adalah pendekatan yang memperluas cakupan akuntansi tradisional dengan memasukkan aspek moral, etika, dan spiritual ke dalam praktik pelaporan dan pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab kita terhadap

Tuhan, masyarakat, dan lingkungan kita. Akuntansi spiritual berpusat pada integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan, yang mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar menurut Iwan Tri Yuwono.⁴⁵

Sifat spiritualitas juga dapat diwujudkan dalam “bentuk” tubuh laporan pemerintahan Akuntansi Syariah. Dalam konteks ini, pada studi

⁴⁴ “Pedoman Umum (Pedum) Raskin,” 2018

⁴⁵ Briando et al., “Tuah Sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara. 2020”

berikutnya juga perlu dipikirkan tentang bagaimana bentuk laporan pemerintahan sebagai wujud dari spiritualitas akuntansi syariah. Dengan masuknya spiritualitas ini, maka laporan pemerintahan akuntansi syariah akan berbeda dengan laporan pemerintah akuntansi konvensional.⁴⁶

Spiritual Accounting dalam Menata Akuntansi Sosial

Konsep spiritual harus menjadi payung untuk melindungi semua dimensi lain (ekonomi, sosial, dan lingkungan), sehingga semua dimensi mengandung nilai-nilai spiritual termasuk cinta, kejujuran, kepercayaan, dan keadilan spiritual didalamnya. Akuntansi sebagai salah satu media informasi entitas bisnis, yang merekam setiap aktifitas ekonomi perusahaan sudah pada tempatnya bila para pelaku ekonomi perusahaan menyajikan suatu bentuk laporan yang mencerminkan keberpihakan dan kepedulian yang tidak semata berorientasi pada kepentingan stakeholder namun juga berorientasi pada kelestarian lingkungan. Membangun konsep pelaporan akuntansi yang mencakup dimensi spiritual membutuhkan landasan konseptual-spiritual yang kokoh, yang bisa menjadi pijakan bagi pengembangan praktik akuntansi dengan dimensi spiritual.

⁴⁶ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁴⁷

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang subjek penelitian, penulis penelitian ini berinteraksi langsung dengan subjek. Penulis akan menggunakan data berupa gambaran dan kata-kata dalam penelitian ini, sehingga penulis akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan kata lain, laporan akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran tentang bagaimana laporan disusun. Gambaran yang dimaksud ini berupa hasil dari proses dalam pengumpulan data yang dimana memberikan penjelasan secara rinci mengenai suatu fenomena atau kejadian berdasarkan fakta yang ditemukan langsung di lapangan. Gambaran ini meliputi proses pengelolaan bantuan beras miskin, faktor penyebab ketimpangan distribusi, tingkat transparansi dan akuntabilitas serta yang terakhir gambaran mengenai hubungan dengan nilai-nilai sosial dan agama.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Alfabeta Bandung, 2022), 2-5.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini, penulis akan melihat keadaan lapangan secara langsung dan mengajak informan untuk memberikan informasi secara alamiah tanpa intervensi dari pihak manapun.⁴⁸ Di dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi langsung dengan mencari informasi terkait pengelolaan beras miskin di Desa Lojejer dengan melakukan interaksi langsung dengan pengelola di desa tersebut serta warga setempat yang memperoleh bantuan beras miskin.

B. Lokasi Penelitian

Desa Lojejer di Kecamatan Wuluhan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki 1.531 keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadikannya salah satu desa dengan jumlah KPM tertinggi di sekitarnya. Kondisi ini menimbulkan masalah lebih besar dalam distribusi bantuan, yang menarik untuk diteliti dari segi kejelasan dan kejujuran. Selain itu, keragaman sosial ekonomi masyarakat Desa Lojejer memungkinkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh tentang praktik pengelolaan bantuan yang adil dan jelas. Secara praktis, mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan memiliki akses ke data di Desa Lojejer membuat proses mendapatkan informasi yang diperlukan lebih mudah. Dari sudut pandang akademis, tempat ini memberikan peluang untuk menerapkan teori akuntansi sosial atau spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan saran praktis untuk meningkatkan pengelolaan bantuan di masa depan.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-34 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 11.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan menemukan hasil melalui teknik purposive, yang merupakan proses pengambilan sumber data melalui berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang dimaksud yakni beberapa orang yang dianggap paling akurat tentang apa yang diharapkan penulis, atau bahwa orang tersebut mungkin bertindak sebagai penguasa, yang memungkinkan penulis untuk lebih mudah menjelajahi subjek dan keadaan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, informan harus memenuhi empat kriteria berikut :

1. Informan merupakan perangkat di kantor Kepala Desa Lojejer
2. Informan memiliki pemahaman tentang pengelolaan bantuan beras miskin
3. Informan merupakan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan beras miskin
4. Informan merupakan warga setempat yang menerima dan yang bermasalah dalam menerima bantuan beras miskin.

Penelitian ini dilakukan di tempat pembagian beras miskin yang dimana berada di Kantor Kepala Desa Lojejer. Dengan mencari dan mengumpulkan data serta menganalisis apakah dalam pengelolaan bantuan beras miskin tersebut sudah transparan dan sudah dipertanggungjawabkan atau belum. Maka Subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Lojejer Bapak Muhamad Sholeh
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lojejer Bapak Badrus Samsi

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2018).

3. Sekretaris Desa Lojejer Bapak Dody Sunarso
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bapak Solikin dan Ibu Suyati
5. Warga yang mengalami masalah dalam penerimaan bantuan Bapak Suwanto dan Ibu Misirah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian/objek penelitian secara sistematis dan terarah.⁵⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati atau menganalisis data sebagai berikut :

- a. Lokasi di Balai Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
- b. Kondisi Desa Lojejer
- c. Kondisi Masyarakat Desa Lojejer

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, yang melibatkan percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh orang yang diwawancarai untuk mencari informasi dan informan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Alfabeta Bandung, 2022), 106.

yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara semi-terstruktur, dimana pelaksanaannya lebih fleksibel daripada wawancara yang direncanakan. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mengeksplorasi masalah secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan gagasan dari orang-orang yang diwawancarai. Wawancara semi terstruktur memberikan kebebasan bagi peneliti dan informan untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul secara alami selama wawancara sambil mempertahankan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang dikatakan informan selama wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif informan yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, wawancara semi-terstruktur berguna dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang subjek penelitian.⁵¹

Adapun data yang diperoleh peneliti dari wawancara yang sudah dilakukan yaitu :

- a. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan.
- b. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Alfabeta Bandung, 2022), 114-116.

3. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data ini yang menggunakan dokumentasi, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, dan elektronik. Penelitian kualitatif membutuhkan dokumentasi untuk melengkapi observasi dan wawancara. Jika hasil penelitian yang berasal dari observasi atau wawancara didukung oleh dokumen yang diperoleh dari narasumber, hasil penelitian akan lebih kredibel dan dapat dipercaya. Dokumen ini dapat berupa berbagai jenis, seperti catatan, surat, laporan, foto, rekaman audio atau video, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi tambahan, mendukung hasil observasi atau wawancara, dan membantu peneliti memahami konteks atau latar belakang dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang menggunakan teknik dokumentasi dapat memperkuat dan memperkaya hasil penelitian dengan memberikan data tambahan yang relevan dan mendukung.

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan metode lainnya disebut analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terkait satu sama lain hingga data menjadi lengkap.⁵² Analisis data deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengorganisasikan

⁵² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), 163.

data menjadi bagian yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dari data, dan memutuskan apa yang dapat dikatakan kepada orang lain. Untuk memulai proses analisis data kualitatif, data yang diperoleh dari observasi dan wawancara disusun secara sistematis. Peneliti kemudian mengumpulkan data, melakukan pengkodean, klasifikasi, pengelompokan, dan kemudian membuat cerita atau laporan berdasarkan hasilnya. Analisis data kualitatif memanfaatkan konteks, makna, dan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang dipelajari. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menyajikan hasil penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian serta untuk menyajikan temuan-temuan yang relevan dan bermakna untuk orang lain. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data tentang tujuan penelitian efektivitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang merupakan catatan di lapangan.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data berarti memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data dapat berupa pendapat dari beberapa subjek yang di jadikan sebagai memperoleh informasi, uraian atau laporan singkat, dan lain-lain.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁵³

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dinyatakan valid selama tidak ada perbedaan antara fakta yang diamati subjek penelitian dan yang dilaporkan peneliti. Ada dua jenis validitas dalam penelitian kualitatif : validitas internal, yang berkaitan dengan akurasi desain penelitian dan hasilnya, dan validitas eksternal, yang berkaitan dengan tingkat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi.⁵⁴

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber ini adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber tidak hanya

⁵³ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 122.

⁵⁴ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (December 24, 2022): 54–64, <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

mewawancarai subyek utama atau pengurus pengelolaan bantuan beras, tetapi juga pihak lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bantuan tersebut. Peneliti bisa mewawancarai kepala seksi kesejahteraan, keluarga penerima manfaat, keluarga yang bermasalah dalam menerima bantuan. Kriteria utamanya adalah bahwa mereka paham dan pernah mendapatkan bantuan tersebut, sehingga dapat memberikan sudut pandang atau informasi yang relevan tetapi dari perspektif yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Lapangan

Tahap-tahap penelitian adalah rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap peneliti yang dilakukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Menyusun Rancangan Penelitian
- b. Memilih Lapangan Penelitian
- c. Mengurus Perizinan
- d. Menjajaki dan Menilai Lapangan
- e. Memilih dan Memanfaatkan Informan
- f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
- g. Memahami Etika Penelitian

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan terkait penelitian ini di Kantor

Balai Desa Lojejer.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan melakukan analisis data yang telah diperoleh dari tahap lapangan baik dari informasi maupun dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk objek penelitian adalah di Kantor Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Agar nantinya saya sebagai peneliti lebih faham mengenai masalah objek dan gambaran penelitian maka dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Desa ini berasal dari bahasa Sanskerta “deka”, yang berarti “tanah air”, “tanah kelahiran”. Desa berfungsi sebagai kelompok masyarakat yang memiliki dasar hukum dan memiliki otoritas untuk mengelola warganya berdasarkan hak, asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan di daerah kabupaten. Satu desa memiliki sistem pemerintah dan banyak penduduk. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.

Peneliti dalam melakukan penelitiannya ingin meneliti di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Yang dimana berdasarkan cerita rakyat Masyarakat Lojejer, sejarah awal Desa Lojejer ini dimulai dengan keinginan warga untuk membentuk pemerintah desa yang terorganisir secepat mungkin. Tokoh masyarakat “Loeko Djojo” dan “Hardjo Oetomo”, yang menjadi panutan masyarakat pada saat itu, adalah orang yang memulai kemauan tersebut. Nama Desa Lojejer berasal dari

pohon “Lo” yang tumbuh secara alami dan berderet atau “Jejer” di sepanjang jalan desa. Pada tahun 1911, keinginan warga akhirnya terwujud dengan pembentukan Pemerintah Desa Lojejer. Berdasarkan kesepakatan warga, “Loeko Djojo” dan “Hardjo Oetomo” diangkat menjadi kepala desa dan carik desa.⁵⁵

2. Kondisi Geografis Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Desa Lojejer sebuah desa yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tepatnya berada di wilayah daerah bagian selatan. Desa Lojejer ini luas areanya sebesar 1.718,75 Ha. Desa Lojejer ini juga memiliki 3 Dusun yang dimana terdapat 12 RW (Rukun Warga) dan 121 RT (Rukun Tetangga). Dusun yang berada di wilayah Desa Lojejer diantaranya yaitu Dusun Krajan, Dusun Sulakdoro, dan Dusun Kepel.



Gambar 4.1 Peta Desa Lojejer

Gambar diatas menunjukkan letak 3 dusun yang berada di Desa Lojejer dimana Dusun Sulakdoro berada di sebelah utara, Dusun Krajan di sebelah barat dan Dusun Kepel berada di sebelah timur Desa Lojejer. Gambar diatas juga menunjukkan batas-batas wilayah Desa Lojejer secara administratif yaitu; di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamansari, di

⁵⁵ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

sebelah timur berbatasan dengan Desa Ampel, dan Desa Sabrang dan Desa Dukuh Dempok, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puger Wetan.⁵⁶

3. Sosial Budaya

a. Demografis / Kependudukan

Berdasarkan data statistik dari Kecamatan Wuluhan, Desa Lojejer memiliki 20.039 penduduk, dengan 5.336 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hampir sama, dengan 10.207 laki laki dan 9.832 perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah dan jenis kelamin juga hampir sama, dengan kata lain terdapat 10.207 pria dan 9.832 wanita.⁵⁷ Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk Desa Lojejer dan kepala keluarga berdasarkan wilayah dan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Lojejer berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

No.	Jumlah Penduduk				
	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	Krajan	3.091	2.998	6.089	1.546
2.	Sulakdoro	4.026	3.858	7.884	2.154
3.	Kepel	3.090	2.976	6.066	1.636
4.	Lojejer	10.207	9.832	20.039	5.336

Sumber : diolah peneliti

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari semua dusun di Desa Lojejer, wilayah Sulakdoro memiliki jumlah penduduk tertinggi

⁵⁶ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

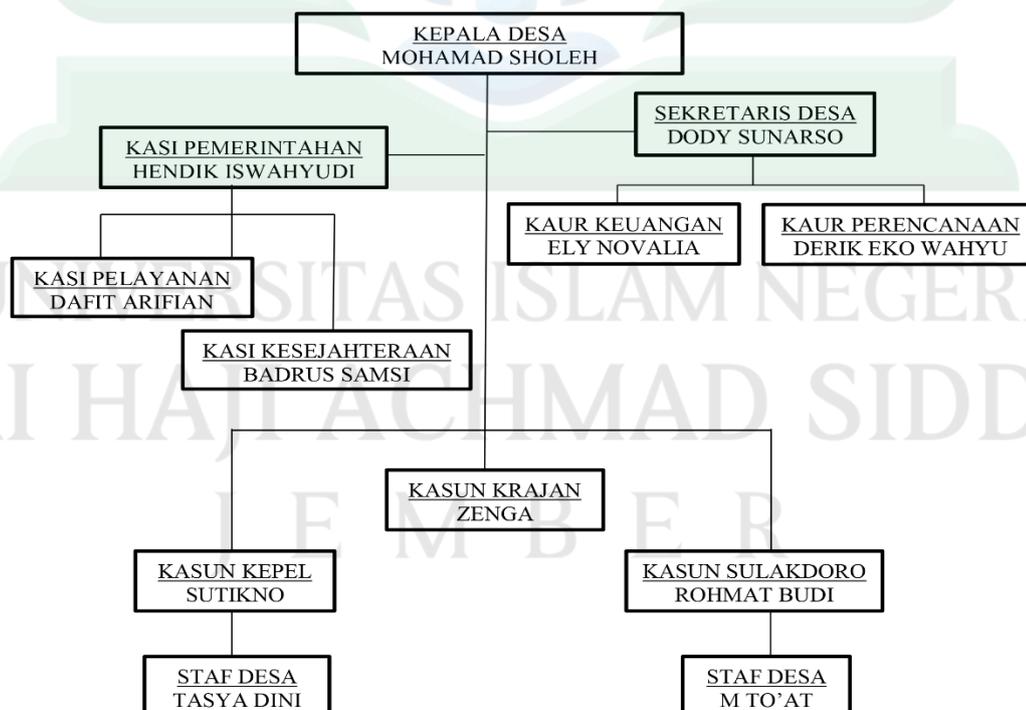
⁵⁷ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

yaitu 7.884 jiwa, dan Dusun Kepel memiliki jumlah penduduk terkecil yakni 6.066 jiwa. Jumlah penduduk di masing masing dusun tidak jauh berbeda dari satu sama lain. Tabel 4.1, berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa laki laki lebih banyak dari perempuan, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan. Penduduk Desa Lojejer tersebar luas di setiap dusun.

4. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember



Sumber : Dokumentasi Desa Lojejer Tahun 2025

5. Visi dan Misi Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

“Desa Lojejer Mandiri Beriman dan Bertaqwa”.

a. Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Mandiri

Kemandirian dalam hal ini meliputi 2 (dua) sisi yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2) Beriman Dan Bertaqwa

Iman dan Takwa merupakan sikap manusia terhadap tuhan. Masyarakat Desa Lojejer adalah masyarakat yang beragama. Sikap orang yang beragama selalu memelihara iman dan takwanya kepada tuhan. bahkan ditingkatkan. Oleh karnanya dalam membuat kebijakan pembangunan Desa juga selalu memperhatikan hal tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa.
- b) Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
- c) Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Makin baiknya kualitas pembangunan desa di segala bidang.

e) Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat Pemberdayaan Sektor Pertanian.

f) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

b. Misi Desa Lojejer Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember

Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.,

Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.,

Mengembangkan perekonomian desa. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerataan desa yang efisien, efektif dan bersih.

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu membina/ mengembangkan, membangun/ memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif, dan transparan serta akuntabel.

Misi 2 : Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana. Oleh karena itu pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya.

Tujuan pokok dalam kaitannya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa dengan menggali, mengoptimalkan pendapatan asli desa dan menggerakkan swadaya masyarakat desa serta

melakukan koordinasi dengan pemerintah atas desa.

Misi 3 : Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan

Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai sumber daya sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi. Upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan

pendapatannya.

Misi 5 : Mengembangkan perekonomian desa

Salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan desa, sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian desa dengan memperluas akses masyarakat desa ke sumber sumber daya produktif, untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Misi 6 : Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.

Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh lapangan antara lain politik/ kekuasaan, hak dan kewajiban serta HAM. Sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi. Namun demikian 2 kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat atau dengan kata lain masyarakat tidak ada rasa aman dan tentram. Selain itu rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi.

Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Kepala Desa dapat diindikasikan sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif.
- 2) Tersusunya program-program pembangunan desa secara efektif dan efisien.
- 3) Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien/ benar.
- 4) Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif.
- 5) Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber pendanaan desa.
- 6) Meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan.
- 7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 8) Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber daya termasuk informasi.
- 9) Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 10) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
- 11) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
- 12) Berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor rill ekonomi desa.⁵⁸

⁵⁸ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

6. Profil Umum Penerima Bantuan Beras di Desa Lojejer

Tabel 4.2
Profil Umum Penerima Bantuan Beras di Desa Lojejer

No	Kategori Penerima	Jumlah (KPM)	Persentase (%)
1.	Total KPM	1.531	100%
2.	Warga Kurang Mampu	1.200	78%
3.	Janda	312	20%
4.	Lansia	210	14%

Sumber : Keterangan dari Pemerintah Desa Lojejer, 2025.

Di Desa Lojejer, sebagian besar bantuan beras diberikan kepada warga kurang mampu, dengan total kurang lebih 78% dari penerima berasal dari kalangan ini. Kelompok lansia serta janda juga menjadi prioritas. Untuk bagian total lansia sendiri kurang lebih mencapai 20% dan janda 14% dari total penerima bantuan. Data menunjukkan bahwa penerima adalah kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.⁵⁹ Meskipun mayoritas warga menerima bantuan sesuai ketentuan, ada juga fenomena ketidakkonsistenan yang menjadi perhatian utama penelitian ini. Ketidakpuasan dan kecemasan di kalangan masyarakat muncul karena beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan tidak menerimanya secara teratur. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada masalah yang mungkin terjadi dengan mekanisme pendataan dan pengelolaan distribusi bantuan, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

B. Penyajian Data dan Hasil Analisis

Proses berikutnya dari skripsi ini yaitu dengan menyajikan data berupa hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai, penelitian dapat dihentikan jika cukup

⁵⁹ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer 27 Februari 2025.

data. Berikut ini adalah hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian :

1. Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember

Beras miskin sendiri merupakan salah satu bantuan dari pemerintah berupa bahan pokok bersyarat yang diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Keberhasilan program bantuan beras diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

a. Mekanisme Pengelolaan Beras Miskin

Dalam pengelolaan bantuan beras miskin ini memiliki beberapa mekanisme diantaranya :

- 1) Bupati/Wali Kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasupdrive/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga miskin yang menerima manfaat Raskin di semua kecamatan dan desa/kelurahan,.

Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa Menjelaskan :

“Jadi gini mba, untuk penerbitan SPA oleh pihak pemerintah daerah ini jadi dasar alokasi beras yang akan didistribusikan. Mereka berperan untuk mempersiapkan pendataan penerima manfaat dan memastikan beras yang diterima oleh warga sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.”⁶⁰

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan, Bapak

Badrus Samsi :

“Jadi mba mereka itu memantau dan mengatur pendataan

⁶⁰ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer 26 Februari 2025.

penerima manfaat setelah SPA diterbitkan untuk memastikan bahwa warga yang benar-benar berhak menerima bantuan sudah terdaftar dengan benar. Biasanya kami mulai dengan mencocokkan data dari pusat dengan kondisi lapangan. Kalau ada warga yang seharusnya masuk tapi belum terdata, biasanya langsung kami koordinasikan dengan pihak desa agar bisa ditindaklanjuti. Kami juga melibatkan RT/RW karena mereka lebih tahu kondisi warganya. Pendataan ini penting supaya bantuan tidak salah sasaran, jadi kami benar-benar berusaha teliti, meskipun terkadang masih ada kendala kalau datanya dari pusat belum diperbarui.”⁶¹

- 2) Menurut SPPB/DO, satuan kerja raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum Bulog dan mengangkutnya dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Pelaksana distribusi termasuk aparat kecamatan, desa, dan kelurahan, serta TP-PKK yang dikhususkan oleh camat. Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa menyatakan :

“Saya dan perangkat desa lainnya bermusyawarah untuk memantau dan memastikan bahwa setiap KPM mendapatkan bagian sesuai dengan data setelah SPPB diterima, dan saya juga melakukan verifikasi langsung di lapangan mengenai penerima manfaat wilayah mereka.”⁶²

Selain itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi menyatakan :

“Saya juga bertanggung jawab untuk mengatur penerima SPPB di tingkat desa mba untuk memastikan bahwa beras dapat didistribusikan segera setelah mereka menerima DO dari Bulog. Untuk pengiriman beras ke desa itu juga semua dari Bulog, kita dari pihak desa hanya menyiapkan tempat dan juga mengatur ke pembagian pada warga.”⁶³

⁶¹ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer 27 Februari 2025.

⁶² Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025

⁶³ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa bekerja sama dengan baik pada tahap pengambilan dan distribusi beras. Pemerintah desa mengelola logistik di tingkat desa, mulai dari penerimaan dokumen SPPB hingga penyaluran ke titik distribusi, sedangkan Bulog bertanggung jawab atas pengiriman beras. Pemerintah desa juga melakukan verifikasi langsung untuk memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar akurat.

- 3) Kemudian pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin individu atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima. Sebelum di buatnya berita acara serah terima para staf desa berkumpul lalu mendiskusikan mana warga yang berhak membutuhkan bantuan tersebut dan sebaliknya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa :

“Kami berusaha memastikan distribusi ini berjalan seadil mungkin. Sebelum dibuatkan surat terima dan bantuan beras dibagikan, kami di pemerintah desa selalu mengadakan pertemuan untuk memastikan siapa saja yang masih berhak menerima dan siapa yang seharusnya sudah tidak mendapatkan bantuan karena kondisi ekonominya sudah membaik. Kami tidak bisa mengubah data sendiri karena itu wewenang pusat, tapi kami tetap mendiskusikan ini agar bantuan lebih tepat sasaran. Meskipun kami tidak bisa mengubah data tetapi kami tetap meninjau ulang mba siapa yang masih pantas mendapatkan bantuan tersebut dan sebaliknya. Saat penyaluran setiap penerima juga harus menandatangani berita acara serah terima sebagai bukti

bahwa mereka benar-benar menerima bantuan.”⁶⁴

Bapak Badrus Samsi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan menambahkan :

“Jadi untuk awal sebelum dibagikan undangan kita berdiskusi dulu mba mana warga yang berhak mendapatkan bantuan dan mana warga yang sudah tidak membutuhkan bantuan tersebut atau di kategorikan sudah mampu. Untuk dari pusat ketika turun kami langsung mengadakan diskusi bersama RT setempat.”⁶⁵

Dari keterangan diatas Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa juga mengatakan :

“Setelah turunnya bantuan dari pemerintah pusat kami tidak langsung memprosesnya ke warga, tetapi mendiskusikan terlebih dahulu dan mendata ulang terkait mana warga yang benar-benar membutuhkan dan mana warga yang sudah di kategorikan cukup dan tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Setelah berdiskusi, saya memintai ke RT untuk mendata warga satu per satu untuk dikumpulkan ke pihak desa kemudian di proses pembagian beras tersebut.”⁶⁶

Dari wawancara diatas ditemukan bahwa sebelum penyaluran raskin, pemerintah desa mengadakan pertemuan untuk merencanakan data penerima manfaat. Pada pertemuan ini, perangkat desa, kepala desa, dan jajaran lainnya meninjau ulang siapa lagi yang harus dimasukkan atau dikeluarkan dari daftar penerima berdasarkan kondisi hasil ekonomi terbaru. Setelah daftar divalidasi, bantuan diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak.

Menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi

⁶⁴ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁶⁵ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

⁶⁶ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

proses pembagian bantuan raskin di desa dilakukan melalui beberapa tahapan, beliau menjelaskan :

“Jadi untuk tahapan-tahapannya kami terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendistribusikan beras di titik pembagian yang telah ditentukan setelah kami memastikan bahwa data penerima kami sesuai. Setelah mengevaluasi tentang penerima yang berhak dan sudah tidak berhak mendapatkan bantuan ini kami membuat undangan lalu dibagikan ke pada masyarakat yang mendapatkan bantuan.”⁶⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan diskusi dan evaluasi terkait bantuan ini pihak desa langsung membuat undangan dan menyebarkan ke warga setempat melalui RT setempat. Bapak Sekretaris Desa Bapak Dody Sunarso menambahkan :

“Untuk tahapan-tahapannya saya akan memberitahukan Kepala Dusun, RT/RW setempat agar memberi tahu warga dan memberikan undangan untuk datang mengambil bantuan setelah tiba waktunya pengambilan. Orang-orang yang mendapatkan bantuan harus membawa identitas mereka dan mendatangi daftar penerima saat penyaluran untuk memastikan bahwa bantuan telah diberikan kepada yang berhak.”⁶⁸

Selain itu, dari keterangan diatas Bapak Kepala Desa Bapak Mohamad Sholeh menambahkan :

“Untuk tahapan-tahapannya pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah RT/RW setempat, dalam proses pembagian agar pembagian berjalan dengan adil dan lancar. Dengan syarat tertentu, warga yang berhalangan hadir dapat mewakilkan pengambilan kepada anggota keluarga mereka.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Seksi

⁶⁷ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

⁶⁸ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

⁶⁹ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

Kesejahteraan dan Sekretaris Desa, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bantuan raskin di Desa Lojejer dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak. Sebelum penyaluran, pemerintah desa mengadakan pertemuan internal untuk meninjau ulang daftar penerima manfaat. Selanjutnya, pemerintah desa, RT/RW, dan aparat terkait bekerja sama untuk menjalankan proses distribusi. Setelah diundang oleh perangkat desa, mereka yang menerima bantuan harus menandatangani daftar penerima atau berita acara serah terima sebagai bukti transparansi. Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa Mengatakan :

“RT/RW sangat penting dalam mekanisme distribusi raskin karena mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan menerapkan distribusi di tingkat dusun atau lingkungan. Serta RT setempat juga yang mengumpulkan data-data terbaru untuk penerima bantuan beras.”⁷⁰

Bapak Badrus Samsi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan juga menjelaskan bahwa :

“Untuk bantuan ini tingkat RT/RW bertugas membantu mendata warga yang berhak menerima bantuan dan memastikan informasi pembagian sampai ke mereka. Setiap kali ada pembagian beras, RT harus menyampaikan informasi ini langsung ke warga, baik melalui pertemuan warga maupun pengumuman lisan.”⁷¹

Selain itu, RT/RW menangani keluhan warga. Jika warga merasa tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, mereka akan melaporkannya ke pemerintah desa untuk diselidiki. Namun, beberapa Keluarga yang bermasalah dalam menerima bantuan

⁷⁰ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁷¹ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

mengakui bahwa pendataan masih menghadapi masalah, seperti warga yang melakukan protes karena tidak terdaftar sebagai penerima. Ibu Misirah salah satu warga yang bermasalah dalam menerima bantuan yang berada di Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 mengatakan :

“Saya ini seorang janda dan hidup sendirian. Umur saya juga sudah tergolong tua. Kalau harus bolak balik ke balai desa untuk menanyakan alasan saya tidak mendapatkan bantuan. Saya kadang-kadang berpikir bahwa berbicara tanpa hasil adalah percuma karena dari pihak desa tidak mengatasi permasalahan ini.”⁷²

Dari penjelasan diatas Ibu Misirah mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali tidak menerima bantuan beras, meskipun dia merasa berhak atasnya. Dalam laporan itu, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin melapor ke pemerintah desa karena dianggap sulit dan tidak menjamin akan mendapatkan solusi. Sementara itu dari dusun satunya yaitu Dusun Kepel RT 02 RW 08 ada Bapak Suwantoro yang mengalami hal sama. Beliau mengatakan :

“Saya bekerja secara serabutan, kadang-kadang saya mendapatkan uang, kadang-kadang tidak. Namun, akan sulit jika nama saya tidak tercantum dalam data. Pernah saya bertanya kepada RT setempat, beliau mengatakan bahwa desa menurunkan data langsung dari pemerintah pusat desa hanya langsung menjalani. Oleh karena itu saya bingung harus lapor ke siapa lagi.”⁷³

Dari keterangan diatas Bapak Suwantoro mengalami hal yang serupa dengan Ibu Misirah yang dimana sering kali tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bapak Suwantoro dan Ibu Misirah ini warga yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Namun, dari hasil

⁷² Misirah, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 04 Maret 2025.

⁷³ Suwantoro, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

wawancara diatas mereka bingung dan takut ribet untuk lapor ke Kantor Desa. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa warga tidak mau atau bersedia mengikuti prosedur yang ada karena kurangnya keterbukaan dari pihak desa, meskipun pihak desa membuka mekanisme pengaduan. Akibatnya, keluhan mereka tidak sampai ke tingkat pemerintah desa, yang sebenarnya memiliki wewenang untuk menindaklanjuti atau menyampaikan keluhan ke pihak yang lebih tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Warga yang Bermasalah dalam Menerima Bantuan, dapat disimpulkan bahwa RT ini sering menjadi tempat pertama bagi warga untuk mengadu jika ada masalah dalam penerimaan bantuan. Namun, banyak warga yang enggan melanjutkan keluhannya ke kantor desa karena merasa prosesnya terlalu rumit atau tidak akan membawa perubahan. Akibatnya, laporan resmi ke pemerintah desa jarang terjadi, meskipun ada mekanisme pengaduan yang tersedia.

Dari penjelasan diatas meskipun pihak desa telah melakukan proses evaluasi dan pendataan ulang sebelum menyebarkan undangan bantuan, masih ditemukan warga yang tidak konsisten mendapatkan bantuan, dan orang yang dianggap mampu terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan belum sepenuhnya menjamin bahwa sasaran distribusi bantuan tepat. Ketidaktepatan ini disebabkan oleh berbagai sumber diantaranya

penggunaan data tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala, dan keterbatasan jumlah sumber bantuan dari pusat.

Setelah menjelaskan tentang mekanisme-mekanisme dalam pengelolaan bantuan raskin ini mulai dari awal pendataan dari pusat hingga akhir yaitu pada tahap pembagian raskin ke titik distribusi namun, pada tahapan akhir pihak desa membuat laporan namun semua data-data yang asli dari pemerintah pusat, dan juga laporan terkait penerima bantuan pihak desa tidak memegang dan langsung di serahkan ke pihak pos. Hal ini juga diungkap oleh Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Sholeh mengatakan :

“Untuk proses pengelolaan bantuan terkait data-data yang dari pihak pemerintah pusat kami tidak memegang namun untuk arsipan data yang sudah di evaluasi kami ada. Setelah proses bantuan kami proses kami langsung membuat laporan dan mengirimkannya ke pusat, namun untuk arsipan dari laporan tersebut desa tidak ada dan tidak memegang mba.”⁷⁴

Hal ini juga di tambahkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi beliau mengungkapkan :

“Jadi gini mba, untuk data-data terkait penerima bantuan setelah awal diberi tahu oleh pos kemudian kami langsung memprosesnya dan langsung dikembalikan kembali ke pihak pos setelah proses distribusinya. Jadi untuk arsipan data yang dari pusat kami tidak memegang mba hanya memegang data yang sudah di evaluasi saja dan di akhir prosesnya kami membuat laporan, tapi tidak membuat arsipanya.”⁷⁵

Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu Bapak Sekretaris Desa Bapak Dody Sunarso :

“Kami pihak desa hanya membantu mendistribusi beras sesuai

⁷⁴ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁷⁵ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

data yang diberikan. Setelah itu, kami serahkan terkait laporan dan tidak ada arsip mengenai laporan atau dokumentasi lebih lanjut.”⁷⁶

Hasil dari wawancara dengan Bapak Kepala desa, Bapak Sekretaris, dan Kepala Seksi Kesejahteraan menunjukkan bahwa tidak ada dokumentasi yang memadai tentang proses pengelolaan bantuan raskin di Desa Lojejer. Meskipun desa mengklaim telah membuat laporan tentang distribusi bantuan, laporan tersebut tidak disimpan secara resmi di tingkat desa. Teori akuntansi spiritual Iwan Tri Yuwono menyatakan bahwa nilai-nilai seperti tauhid, amanah, keadilan, dan ihsan harus ada dalam pengaturan bantuan raskin. Laporan yang tidak tersip menunjukkan kurangnya dokumentasi, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan. Selain itu, hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa penerima akhir bantuan ketika data dikembalikan ke pendistribusi atau pihak pos.

b. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

- 1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan raskin ini secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Pihak desa hanya menerima dan membantu pendistribusian kepada warga.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Kepala

⁷⁶ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

Desa Bapak Mohamad Sholeh beliau mengungkapkan :

“Kalau untuk soal pengiriman beras ke desa itu semua dari Bulog mba, kita dari pihak desa hanya menyiapkan tempat dan juga mengatur ke pembagian pada warga. Jadi untuk semua biaya dan transportasi pengangkutan beras pihak desa tidak menanggung semuanya dari pemerintah, pihak desa hanya mengelola bantuan tersebut agar tepat sasaran sampai ke warga.”⁷⁷

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Sekretaris Desa Bapak Dody Sunarso yang juga ikut membantu dalam proses pendistribusian di lapangan langsung :

“Biasanya truk dari Bulog langsung datang ke balai desa. Kita membantu untuk menerima dan juga warga satu per satu dipanggil sesuai dengan daftar. Untuk tanggung jawab di lapangan semua di atur pihak desa.”⁷⁸

Keluarga Penerima Manfaat KPM pun membenarkan bahwa pengambilan dilakukan di titik yang ditentukan. Seperti disampaikan Ibu Suyati Warga Dusun Krajan RT 10 RW 02 :

“Saya biasa mengambil langsung ke balai desa mba, sudah ditentukan harinya dan saya dipanggil sesuai nama. Jadi langsung datang dengan menyerahkan KTP, bawa karung sendiri lalu tinggal mengambil bantuan tersebut sesuai dengan nama yang di panggil dan nama-nama yang mendapatkan bantuan dari RT setempat.”⁷⁹

- 2) Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan 10-15 kg per KPM.

Hal diatas juga diungkap dari hasil wawancara Bapak

⁷⁷ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁷⁸ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

⁷⁹ Suyati, diwawancarai oleh Penulis, Krajan Lojejer, 03 Maret 2025.

Solikin Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 selaku keluarga penerima manfaat :

“Dapetnya satu sak mba dan ada tulisanya Bulog. Isinya sekitar 10 kiloan, lumayan buat stok makanan sehari hari sampe seminggu atau dua mingguan. Jadi, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan saya sehari-hari. Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah karena sudah memberikan bantuan pangan ini berupa beras yang pasti dengan jumlah yang cukup banyak bisa untuk makan saya sekeluarga sehari-hari.”⁸⁰

Pernyataan ini di perkuat oleh Bapak Badrus Samsi,

Kepala Seksi Kesejahteraan :

“Beras dari Bulog dikemas dengan logo Bulog, biasanya 10 sampai 15 kilogram per KPM sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan pusat. Jadi untuk total beras yang diberikan sudah ditentukan dari Bulog pihak desa hanya mengelola siapa saja warga yang layak mendapatkan bantuan tersebut.”⁸¹

3) Rencana Penyaluran

Dalam rencana penyaluran ini untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi

Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. Penjadwalan penyaluran dibuat oleh pusat dan

disampaikan ke daerah melalui surat atau pemberitahuan dari kecamatan. Pemerintah desa hanya menunggu arahan untuk

mengimplementasikan. Dalam wawancara, Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi beliau menyatakan :

“Kami mendapat informasi dari kecamatan, dan kami akan

⁸⁰ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁸¹ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

menyiapkan pembagian kepada warga setelah jadwal turun. Jadi untuk penyaluran bantuan ini kami menunggu terlebih dahulu dari pusat agar kami bisa langsung mengelolanya dan membagikan ke warga setempat.”⁸²

Hal ini diperkuat oleh Kepala Desa Bapak Muhamad Sholeh :

“Jadwal itu kami terima dari kecamatan, biasanya setiap bulan ada pemberitahuan. Kami hanya mengikuti dan mempersiapkan teknis di lapangan. Jadi untuk jadwal-jadwal mendapatkan bantuan tersebut pihak desa tidak mengetahuinya mba.”⁸³

Namun, menurut warga yang mengalami kendala, seperti Ibu Misirah Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07, sistem informasi tersebut terkadang kurang jelas :

“Kadang jadwal penyaluran tidak jelas mba, jadi saya pernah kelewat ambil. Harusnya jadwalnya itu bisa disampaikan lebih terbuka ke semua warga. Tidak tiba-tiba langsung memberikan undangan tanpa pengumuman yang jelas dari pihak desa.”⁸⁴

4) Mekanisme Penyaluran

- a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati / Walikota / Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota menerbitkan SPA kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan beras sesuai alokasi yang sudah ditetapkan. Hal ini juga diungkap oleh Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa :

“Jadi gini mba, untuk penerbitan SPA oleh pihak pemerintah daerah ini jadi dasar alokasi beras yang akan didistribusikan. Mereka berperan untuk

⁸² Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

⁸³ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁸⁴ Misirah, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

mempersiapkan pendataan penerima manfaat dan memastikan beras yang diterima oleh warga sesuai dengan alokasi yang ditetapkan”.⁸⁵

Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Badrus Samsi selaku Kepala Saksi Kesejahteraan. Beliau mengatakan :

“Jadi mba mereka itu memantau dan mengatur pendataan penerima manfaat setelah SPA diterbitkan untuk memastikan bahwa warga yang berhak menerima bantuan terdaftar dengan benar”.⁸⁶

b) Penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

Berdasarkan SPA, Perum Bulog kemudian mengeluarkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) atau Order of Delivery (DO) untuk setiap kecamatan, desa, atau kelurahan. Ini dilakukan baik dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkap selaku Bapak Dody Sunarso Sekretaris Desa :

“Saya dan perangkat desa lainnya bermusyawarah memantau dan memastikan bahwa setiap KPM mendapatkan bagian sesuai dengan data setelah SPPB diterima, dan saya juga melakukan verifikasi langsung di lapangan mengenai penerima manfaat wilayah mereka”.⁸⁷

Hal sama juga diungkap oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi beliau mengatakan:

“Saya juga bertanggung jawab untuk mengatur

⁸⁵ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁸⁶ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

⁸⁷ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

penerimaan SPPB di tingkat desa mba untuk memastikan bahwa beras dapat didistribusikan segera setelah mereka menerima DO dari Bulog”.⁸⁸

c) Penyaluran Beras

Menurut SPPB/DO, Perum Bulog mengirimkan beras ke Tempat Distribusi (TD), yang merupakan titik distribusi yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dari selaku Kepala Desa Bapak Mohamad Sholeh :

“Jadi saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa beras sampai ke desa dalam kondisi baik dan tepat sasaran. Mereka memastikan bahwa beras disalurkan ke desa-desa yang sesuai dengan alokasi dan dalam kondisi yang layak konsumsi”.⁸⁹

Hal ini juga sejalan dengan yang di ungkap Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa :

“Saya Sekretaris Desa tetapi saya juga ikut berperan dalam proses distribusi di tingkat desa mba, memastikan bahwa beras yang diterima oleh KPM adalah sesuai jumlahnya. Saya dan perangkat desa lainnya bekerja sama untuk menghindari adanya ketidakadilan atau kekurangan beras pada warga.”⁹⁰

Hal ini juga sejalan dengan KPM Ibu Suyati Dusun Krajan RT 10 RW 02 yang mengungkapkan bahwa :

“Saya merasa bantuan beras yang saya terima sesuai dengan kebutuhan saya mba, meskipun terkadang mengalami penundaan distribusi beras dari pihak desa yang memengaruhi ketersediaan di rumah.”⁹¹

⁸⁸ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

⁸⁹ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁹⁰ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

⁹¹ Suyati, diwawancarai oleh Penulis, Krajan Lojejer, 03 Maret 2025.

d) Pengecekan Kualitas Beras

Sebelum didistribusikan, kualitas beras diperiksa oleh Tim Koordinasi Raskin di gudang Perum Bulog, dan pihak terkait menandatangani. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Mohamad Sholeh :

“Saya akan terus melakukan pengecekan ulang beras di tingkat desa mba untuk memastikan bahwa beras yang diterima oleh KPM tidak rusak dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, meskipun pengecekan kualitas beras dilakukan di gudang.”⁹²

Hal ini juga diungkap dari salah satu KPM Bapak Solikin Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 beliau mengatakan :

“Sebagian besar beras yang saya terima dalam kondisi baik mba, namun saya juga terkadang mendapatkan beras yang kadang tidak layak makan atau mengandung debu dan saya sudah melaporkannya.”⁹³

e) Serah Terima Beras

Di TD, Satker Raskin dan Tim Koordinasi/Pelaksanaan Distribusi Raskin menyerahkan beras. Selain itu, dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Mohamad Sholeh beliau mengatakan :

“Jadi mba serah terima beras ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Saya memastikan bahwa beras yang diterima desa dicatat dengan jelas dan BAST

⁹² Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁹³ Solikin, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

digunakan sebagai acuan untuk pertanggungjawaban distribusi.”⁹⁴

Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa juga mengatakan :

“Saya dan perangkat desa lainnya bermusyawarah memantau serah terima beras ditingkat desa untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang dirugikan selama proses distribusi.”⁹⁵

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Suwantoro Dusun Kepel RT 02 RW 08 yaitu salah satu warga yang mengalami masalah dengan distribusi beras.

“Jadi saat saya tidak menerima bantuan beras sesuai dengan alokasi yang seharusnya, saya berharap proses serah terima menjadi lebih jelas sehingga tidak ada ketimpangan mba. Karena saya warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut merasa di rugikan di karenakan kurangnya kejelasan dari pihak desa.”⁹⁶

Hal serupa juga di ungkap dari Ibu Misirah warga yang bermasalah dalam menerima bantuan di Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 :

“Saya janda dan hidup sendirian seharusnya bantuan ini tepat sasaran dan proses serah terima lebih jelas sehingga tidak terjadi salah sasaran dan warga seperti saya yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut seharusnya layak mendapatkan bantuan dan tidak terkena dampak dari pihak desa yang kurang jelas.”⁹⁷

Dari keterangan diatas sebenarnya pihak desa sudah

⁹⁴ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁹⁵ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

⁹⁶ Suwantoro, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

⁹⁷ Misirah, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

membuat serah terima namun tidak adanya keterbukaan kepada warga sehingga warga yang bermasalah dalam menerima bantuan kena imbasnya. Seperti yang di ungkap dari Ibu Misirah dan Bapak Suwantoro.

f) Penyaluran Raskin Secara Rutin

Secara umum, distribusi Raskin dilakukan setiap bulannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti musim panen atau cuaca, distribusi dapat disesuaikan sesuai dengan Juklak/Juknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Bapak Mohammad Soleh beliau mengungkapkan bahwa :

“Distribusi seharusnya dilakukan setiap bulan mba, tetapi kadang-kadang tertunda karena masalah logistik atau cuaca mba. Saya bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi tetap berjalan meskipun ada kendala.”⁹⁸

Hal ini juga sejalan dengan yang diungkap dari salah satu KPM Ibu Suyati Dusun Krajan RT 10 RW 02 Beliau mengatakan:

“Meskipun penyaluran seharusnya rutin, saya kadang-kadang bingung mba saat distribusi terlambat, yang sering menyebabkan kekhawatiran, terutama bagi saya yang sangat bergantung pada bantuan tersebut.”⁹⁹

Dari hasil diatas disimpulkan bahwa distribusi bantuan ini tidak rutin dilakukan setiap bulanya tergantung kondisi

⁹⁸ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

⁹⁹ Suyati, diwawancarai oleh Penulis, Krajan Lojejer, 03 Maret 2025.

dan cuaca di setiap tempatnya. Hal ini juga berdampak pada keluarga yang menerima bantuan yang bergantung pada bantuan tersebut.

c. Kriteria Penerima Raskin di Desa Lojejer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar yang digunakan pemerintah desa untuk memilih penerima bantuan beras miskin (Raskin) didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan didukung oleh pendataan lapangan. Beberapa kriteria yang diidentifikasi oleh penelitian yaitu :

- 1) Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
- 2) Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp.1.500.000.
- 3) Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- 4) Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian.
- 5) Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang).
- 6) Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu.
- 7) Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
- 8) Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
- 9) Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat

geribik/gabus

10) Sumber air sumur masih menimba atau manual

11) Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/menggunakan listrik akan tapi masih menumpang. Namun, masih ditemukan permasalahan seperti data yang tidak diperbarui, sehingga ada warga yang miskin tidak terdata, dan sebaliknya.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Kepala Desa

Bapak Mohamad Sholeh beliau mengatakan :

“Jadi kami mengacu pada data DTKS dari pusat, tetapi faktanya di lapangan terkadang tidak semua yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Masih ada warga yang kehidupannya sudah lebih layak, tetapi masih terdata mendapatkan bantuan. Kami tidak punya kuasa langsung untuk mengubahnya dari pusat, tetapi kami usahakan untuk mengevaluasinya lewat musyawarah desa dan laporan ke kecamatan.”¹⁰⁰

Hal serupa juga diungkap Bapak Badrus Samsi selaku

Kepala Seksi Kesejahteraan beliau mengatakan :

“Jadi untuk sebagian besar KPM memang sesuai kriteria, tidak mempunyai penghasilan tetap, tinggal di rumah yang kurang layak, sumber air masih manual. Tetapi mba, kami juga menyadari bahwa masih ada yang lebih pantas namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.”¹⁰¹

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari salah satu KPM Bapak Solikin dari Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07

beliau mengatakan :

“Pekerjaan saya serabutan mba, dan penghasilan juga tidak menentu. Terkadang Rp 15.000, terkadang tidak sama sekali. Sumber air saya masih manual, listrik menumpang,

¹⁰⁰ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

¹⁰¹ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

dan sering mengutang untuk kebutuhan makan sehari-hari.”¹⁰²

Bapak Suwanto dari Dusun Kepel RT 02 RW 08 beliau mengatakan :

“Saya hidup sendiri mba, rumah saya juga dari semen yang kasar. Saya tidak punya penghasilan tetap. Saya bingung mba untuk makan sehari-hari, terlebih dari pihak desa saya tidak rutin mendapatkan bantuan beras untuk kebutuhan pokok saya. Saya pun bingung mba kenapa saya tidak rutin di tiap bulannya mendapatkan bantuan tersebut.”¹⁰³

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang ada di DTKS. Namun, dalam prosesnya masih terjadi permasalahan yang dimana warga yang mengalami kesusahan dan data sudah sesuai kriteria penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan tersebut, dikarenakan proses bantuan dari pemerintah yang melambat dan tidak diperbarui. Pemerintah desa menyadari permasalahan ini dan mereka berusaha bermusyawarah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, terbatas dalam wewenang untuk mengubah data dari pusat sehingga pembagian tersebut masih sering memakai data yang lama dan akhirnya tidak kompeten hasilnya. Namun, pihak desa sedang mengupayakan dengan memberikan usulan kepada instansi di atasnya agar data tersebut di perbarui.

¹⁰² Solikin, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

¹⁰³ Suwanto, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

2. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

a. Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial, khususnya bantuan beras miskin, merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola yang baik di tingkat desa. Berdasarkan teori Lukviarman (2016), transparansi didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin bahwa seetiap orang memiliki akses ke informasi yang berkaitan dengan hasil operasi lembaga publik, kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan.¹⁰⁴ Ini berarti dalam konteks desa masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pendataan, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan dilakukan oleh aparat desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan transparansi dalam manajemen bantuan beras miskin Desa Lojejer. Hasil wawancara dengan berbagai sumber menunjukkan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan:

1) Kurangnya Keterbukaan Informasi Terkait Pendataan Penerima

Sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengatakan mereka tidak tahu secara jelas bagaimana mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebagaimana disampaikan oleh KPM yaitu Bapak Solikin Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 beliau menyampaikan :

¹⁰⁴ Lukviarman, *Corporate Governance*. PT Era Adicitra Intermedia, Solo Mahsun, Moh. sulistyowati F dan Purwanugraha, Heribertus A. (Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.: Akuntansi Sektor Publik, 2016).

“Saya tidak tahu mba proses pembagiannya kapan dan tidak ada pengumuman dari pihak desa, biasanya setiap bulan pasti cair dan tiba-tiba saya mendapatkan undangan dari Bapak RT untuk mengambil bantuan berupa beras tersebut di kantor balai desa. Jadi untuk detailnya saya tidak mengetahui, saya tahunya mendapatkan bantuan untuk mengambil di desa sembari membawa KTP untuk persyaratannya.”¹⁰⁵

Keterangan serupa diperjelas dari Ibu Misirah dari Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 selaku warga yang mengalami masalah dalam penerimaan bantuan. Ibu mengatakan :

“Pemerintah desa tidak memberitahukan pengumuman apapun mba. Tiba-tiba bulan ini saya mendapatkan bantuan, tetapi bulan berikutnya tidak mendapatkan bantuan padahal rumah sebelah saya mendapatkan bantuan tersebut mba.”¹⁰⁶

Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi juga mengungkapkan bahwa informasi tidak secara resmi diumumkan ke masyarakat :

“Tidak kami tempel datanya mba, karena nanti takutnya terjadi keributan antar warga. Jadi hanya RT yang menyampaikan ke warga yang dapat bantuan. Karena takutnya kalau di publikasikan ke warga takut terjadi kegaduhan karena warga satunya merasa iri tidak mendapatkan bantuan tersebut. Jadi untuk data-data terkait penerima bantuan cukup sebagai arsip desa saja, pihak masyarakat hanya mendapatkan undangan tidak mengetahui detail siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut.”¹⁰⁷

Dari wawancara diatas pemerintah desa seharusnya memberikan informasi yang mudah diakses, tetap, dan akurat, menurut prinsip transparansi yang dikembangkan dalam kajian teori. Namun, ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi

¹⁰⁵ Solikin, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

¹⁰⁶ Misirah, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

¹⁰⁷ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

belum diterapkan sepenuhnya. Selain itu, tidak ada transparansi indikator seperti pengumuman terbuka, partisipasi masyarakat, dan dokumentasi prosedur di Desa Lojejer.

2) Penyaluran Tidak Merata dan Tidak Konsisten

Ada beberapa warga yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan secara teratur, padahal mereka benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Berbanding terbalik dengan warga yang mampu tetapi malah mendapatkan bantuan tersebut secara teratur. Hal ini juga diperjelas dengan hasil wawancara dari warga yang mengalami masalah dalam penerimaan bantuan. Bapak Suwanto dari Dusun Kepel RT 02 RW 08 mengatakan :

“Tetangga saya tergolong mampu mba, punya mobil rumah bagus dan punya motor tetapi malah sering mendapatkan bantuan tersebut mba, sedangkan saya tergolong warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan berupa beras tersebut tidak teratur mba, saya bertanya ke pak RT katanya itu sudah dari pusat dan saya bingung harus bagaimana mau mengadu ke siapa tentang ini mba.”¹⁰⁸

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa tidak ada saluran informasi yang terbuka dan jelas untuk menjawab keluhan masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip transparansi. Menurut akuntansi spiritual, transparansi bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut kejujuran, amanah, dan komunikasi yang tulus sebagai bagian dari ibadah.

3) Tidak Ada Sosialisasi Terbuka atau Laporan Publik

¹⁰⁸ Suwanto, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan pemerintah desa diwawancarai mengatakan bahwa data penerima bantuan dibuat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian dibahas melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah tidak diumumkan secara terbuka. Bahkan RT/RW mengakui bahwa informasi hanya diberikan secara terbatas dan tidak tertulis. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan :

“Biasanya kita ngasih tahu dari mulut ke mulut saja, karena jika diumumkan bisa ribut, banyak yang protes. Untuk proses pengumumannya jadi berupa undangan dan dari mulut ke mulut sampai ke warga untuk detailnya kami tidak memberitaukan secara publik.”¹⁰⁹

Salah satu KPM Ibu Suyati dari Dusun Krajan RT 10 RW 02 juga mengatakan :

“Saya tidak pernah melihat pengumuman siapa saja yang mendapat bantuan, tiba-tiba di datangi RT untuk menyerahkan KTP dan KK lalu diberikan undangan besoknya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi tidak ada papan pengumumannya.”¹¹⁰

Dari informasi diatas membuktikan bahwa hal ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi akuntansi spiritual, yang dimana menekankan komunikasi yang jujur dan terbuka serta pengungkapan data dengan niat tulus untuk keadilan. Menyampaikan informasi dengan benar dianggap sebagai cara untuk beribadah kepada Tuhan dalam hal spiritualitas.

4) Keterlibatan Masyarakat Masih Rendah

¹⁰⁹ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

¹¹⁰ Suyati, diwawancarai oleh Penulis, Krajan Lojejer, 03 Maret 2025.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak pernah berpartisipasi dalam proses validasi data atau diskusi forum tentang bantuan. Namun, berdasarkan prinsip transparansi masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam perencanaan dan pengawasan karena itu adalah salah satu indikator penting. Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Bapak Solikin dari Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 mengatakan :

“Kita tidak pernah diajak rapat atau dimintai pendapat. Pokoknya sudah ditentukan saja nama-namanya yang mendapatkan bantuan. Jadi untuk musyawarah terkait bantuan ini pihak desa tidak melibat warga sama sekali alasanya karena takut terjadi keributan antar warga.”¹¹¹

Hasil wawancara diatas juga sejalan dengan hasil wawancara Bapak Suwantoro dari Dusun Kepel RT 02 RW 08 selaku warga yang bermasalah dalam menerima bantuan :

“Saya tidak pernah diajak berdiskusi terkait bantuan ini mba oleh pihak desa maupun RT setempat. Jadi tidak tau kenapa saya jarang mendapatkan bantuan ini mba, padahal dilihat dari kondisi saya ini sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.”¹¹²

Dari hasil wawancara diatas praktik ini sangat bertentangan dengan teori bahwa transparansi mencakup keterbukaan prosedural, dan juga termasuk dalam perencanaan dan penganggaran.

5) Belum Adanya Mekanisme Laporan yang Diumumkan ke Publik.

Menurut Kepala Desa, laporan terkait bantuan beras sebenarnya ada, namun belum di publikasikan secara terbuka, dan ini sifatnya ada

¹¹¹ Solikin, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

¹¹² Suwantoro, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

sementara. Karena laporan terkait bantuan ini langsung di kembalikan ke pihak lewat pos.

Hal ini diungkap dari Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa :

“Untuk laporan awalnya ada mba, namun tidak saya umumkan ke publik hanya pihak desa yang tau dan RT setempat karena selebihnya laporan tersebut kami kembalikan ke pos jadi kami tidak menyimpan dan mempublikannya supaya tidak menimbulkan kegaduhan antar warga.”¹¹³

Bapak Dody Sunarso selaku Sekretaris Desa mengatakan :

“Untuk laporan saya tau, namun untuk hal ini pihak desa melarang untuk memberi tahu warga karena takut terjadi keributan karena saling iri satunya mendapatkan bantuan tersebut satunya tidak. Jadi untuk laporan dari pusat kami terima setelah itu setelah kami proses langsung pihak desa mengembalikan ke pos dan tidak ada arsip laporan lagi terkait bantuan ini.”¹¹⁴

Namun, prinsip transparansi menyatakan bahwa laporan pengelolaan bantuan sosial seharusnya dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini akan mencegah kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam akuntansi spiritual, tertutupan informasi seperti ini berpotensi menghapus nilai-nilai kejujuran, amanah, dan juga keadilan.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan

Wuluhan Kabupaten Jember

Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan administratif untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan bantuan sosial seperti bantuan beras miskin ini, ini berarti pengelola harus dapat bertanggung jawab atas proses

¹¹³ Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

¹¹⁴ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

perencanaan, pendataan, distribusi, dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat penerima manfaat. Akuntabilitas spiritual mengacu pada tanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri. Dalam mengelola setiap amanah publik, termasuk memberikan bantuan beras miskin, nilai-nilai utama seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan harus dijunjung tinggi. Pengelolaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan spiritual dan akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum mengacu pada seberapa ketat pengelola bantuan tunduk pada peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kesalahan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi

Kesejahteraan Bapak Badrus Samsi mengatakan :

“Kami di desa mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk tentang pendataan dan pembagian. Tapi kami tidak bisa mengubah data dari pusat. Kalau ada warga yang seharusnya dapat tetapi tidak terdata, kami hanya bisa mencatat dan menunggu instruksi.”¹¹⁵

Hal ini juga di sampaikan dari Bapak Sekretaris Desa Bapak Dody

Sunarso beliau mengatakan :

“kadang-kadang kami pihak desa merasa serba salah karena ada warga yang merasa berhak, tetapi nama mereka tidak muncul dalam data. Kami hanya menyampaikan informasi berdasarkan daftar yang diterima dari dinas. Saya dan perangkat lainnya tidak dapat mengubah data yang diberikan oleh pemerintah pusat.”¹¹⁶

¹¹⁵ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

¹¹⁶ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Misirah Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 salah satu warga yang bermasalah dalam menerima bantuan beliau mengatakan :

“Saya pernah bulan lalu mendatkan bantuan tersebut namun bulan berikutnya tidak mendapatkan lagi. Saya bingung, saya warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut secara rutin tetapi malah tidak rutin mendapatkan bantuan, padahal pada bulan itu bantuan cair tetapi saya tidak mendapatkannya. Saya tanyakan ke RT setempat katanya datanya sudah dari pusat, pihak desa apalagi RT tidak bisa mengubahnya.”¹¹⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa terus mengupayakan akuntabilitas kejujuran, tetapi kekurangan data dari pemerintah pusat menghambat akuntabilitas hukum. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memicu ketidakadilan.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan mekanisme pelaksanaan, sistem informasi, dan prosedur yang digunakan. Bapak Dody Sunarso

selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan :

“Beras biasanya diambil di kantor kepala desa setelah undangan dibagikan kepada warga. Tetapi, kami tidak umumkan penerimanya secara terbuka di karenakan takut terjadi kericuhan mba, jadi hanya kami umumkan lewat personal saja dengan membagikan undangan ke masing-masing yang mendapatkan untuk mengambilnya ke kantor balai desa.”¹¹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Suyati selaku KPM dari

Dusun Krajan RT 10 RW 02 beliau mengatakan :

¹¹⁷ Misirah, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 04 Maret 2025.

¹¹⁸ Dody Sunarso, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 28 Februari 2025.

“Jadi untuk pembagian bantuan ini tidak ada papan informasi atau pengumuman resmi dari pihak desa mba. Kami tiba-tiba hanya mendapatkan undangan dari RT setempat saja jika mendapatkan bantuan tersebut dan di suruh langsung mengambilnya di kantor kepala desa.”¹¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses distribusi kurang berjalan dengan maksimal dan kurang transparan. Hal ini disebabkan karena tidak disertai pengumuman publik yang dapat diakses semua warga. Mekanisme tidak sepenuhnya akuntabel karena informasi penting seperti kriteria penerima dan prosedur seleksi tidak diumumkan secara terbuka. Hal ini menentang prinsip akuntansi spiritual yang dimana pihak desa tidak memiliki ihsan yang bertanggungjawab dan juga tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya karena kurangnya keterbukaan kepada warga.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menentukan apakah program tersebut mendukung tujuan organisasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Solikin selaku KPM dari Dusun Sulakdoro RT 10 RW 07 beliau mengatakan :

“Bantuan ini sangat membantu saya, terlebih harga beras sekarang mahal dan saya sangat membutuhkan bantuan itu sebagai panganan pokok keseharian saya. Tapi sayangnya bantuan ini tidak merata, warga yang kurang mampu masih ada yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.”¹²⁰

Hal serupa juga diungkap dari Bapak Suwantoro dari Dusun Kepel RT 02 RW 08 selaku warga yang bermasalah dalam menerima bantuan

¹¹⁹ Suyati, diwawancarai oleh Penulis, Krajan Lojejer, 03 Maret 2025.

¹²⁰ Solikin, diwawancarai oleh Penulis, Sulakdoro Lojejer, 04 Maret 2025.

mengatakan :

“Saya terkadang di bulan tertentu tidak mendapatkan bantuan tersebut mba, saya tidak tahu alasannya kenapa dan saya bingung harus mengadu kesiapa karena nantinya takut rumit dan tidak ada respon. Jadi kalau tidak mendapatkan bantuan saya cukup diam saja mba, dan sambil berdoa supaya bulan berikutnya saya mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini membuat saya benar-benar kecewa kepada pihak desa mba.”¹²¹

Secara umum program ini sebenarnya sangat bermanfaat dan mendukung kesejahteraan warga, namun kelemahan dalam pendataan dan ketidakpastian penerima serta minimnya informasi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas horizontal, karena masyarakat tidak diajak memahami proses atau diberi ruang untuk memberi masukan. Dalam akuntansi spiritual seharusnya akuntabilitas ini mengandung pertanggungjawaban yang jujur, agar penerima merasa dihargai dan diberi hak untuk mengawasi serta warga juga merasakan manfaatnya semua dari bantuan tersebut.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Hal ini di perjelas dengan wawancara dari Bapak Mohamad Sholeh selaku Kepala Desa beliau mengatakan :

“Kami hanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Untuk penerima bantuan kami tidak memiliki wewenang mengubahnya meskipun pada tahap awal sebelum dibagikan undangan kami melakukan evaluasi namun tetap memakai data yang lama. Pihak desa hanya memiliki wewenang untuk menyalurkan ke masyarakat saja.”¹²²

¹²¹ Suwanto, diwawancarai oleh Penulis, Kepel Lojejer, 05 Maret 2025.

¹²² Mohamad Sholeh, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 26 Februari 2025.

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Badrus Samsi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan beliau mengatakan :

“Untuk bagian penerima, kami pihak desa tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya mba, kalau soal data itu sudah dari pemerintah pusat. Namun, dalam prosesnya ketika ada warga yang melakukan komplain ke pihak desa kami tetap menampungnya dan mencatatnya.”¹²³

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan memperbaiki sistem. Sikap seperti ini dalam *spiritual accounting* menunjukkan rasa tanggung jawab yang lemah kepada masyarakat dan mencederai prinsip keadilan dan kepedulian sosial.

Secara keseluruhan, hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan beras Desa Lojejer masih belum mencapai tingkat yang optimal. Akuntabilitas spiritual, yang menekankan kejujuran dalam pendataan, keterbukaan informasi, tanggung jawab moral terhadap masyarakat, dan evaluasi yang adil dan berkelanjutan, belum sepenuhnya diterapkan.

Namun, akuntabilitas administratif masih berjalan. Pengelolaan bantuan dalam akuntansi spiritual harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan ilahiah selain prosedur. Amanah pengelola bantuan dilanggar ketika laporan tidak dikirim, data tidak akurat, dan warga merasa diabaikan. Ini adalah jenis kelalaian spiritual serta administratif.

¹²³ Badrus Samsi, diwawancarai oleh Penulis, Lojejer, 27 Februari 2025.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan ini adalah untuk memberikan penjelasan lengkap dan mendalam tentang bagaimana sistem pengelolaan berfungsi, bagaimana penyaluran dilakukan, dan seberapa transparan dan akuntabel bantuan beras miskin di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Semua data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan pengamatan di lapangan. Kemudian, dianalisis menggunakan pendekatan teori.

1. Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember

a. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer

- 1) Bupati/Wali Kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasudrive/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin tangga miskin yang menerima manfaat Raskin di semua kecamatan dan desa/kelurahan. Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten mengajukan SPA ke Perum Bulog, yang kemudian menerbitkan SPPB. Namun, hasil temuan di temukan proses ini tidak melibatkan pemutakhiran data KPM untuk desa, mereka hanya menerima data dan harus menyerahkannya sebagaimana adanya. Menurut teori Iwan Triyuwono, ini melanggar prinsip keadilan karena bantuan tidak diberikan kepada yang benar-benar berhak.¹²⁴ Dalam perspektif manajemen publik, mekanisme ideal adalah yang partisipatif

¹²⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

dan adaptif terhadap kondisi lokal.¹²⁵ Namun, mekanisme di Desa Lojejer terlalu *hierarkis* dan *top-down*, mengabaikan kebutuhan masyarakat nyata.

- 2) Menurut SPPB/DO, satuan kerja raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum Bulog dan mengangkutnya dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Pelaksana distribusi termasuk aparat kecamatan, desa, dan kelurahan, serta TP-PKK yang dikhususkan oleh camat. Di Desa Lojejer, lokasi distribusi adalah rumah kepala desa. Namun, informasi tentang jadwal distribusi tidak diberikan secara terbuka kepada masyarakat dalam praktiknya. Nama-nama penerima bantuan bahkan tidak diumumkan. Menurut teori akuntabilitas, manajer sumber daya publik harus bertanggung jawab atas setiap proses kepada masyarakat.¹²⁶ Ketidakterbukaan distribusi menunjukkan bahwa akuntabilitas belum dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan akuntansi spiritual, menyebarkan informasi yang tidak jelas adalah pelanggaran terhadap keadilan dan ihsan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sesama manusia dan Allah SWT, bantuan yang berasal dari publik harus diberikan dengan tulus dan secara terbuka.¹²⁷

- 3) Pelaksanaan distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga

¹²⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama (Garis Khatulistiwa Makassar, 2020), 138.

¹²⁶ Juwita Nur Radeana et al., "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance."

¹²⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

miskin individu atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima. Sebagai langkah terakhir, bantuan beras diberikan kepada RTS yang berhak, bersama dengan pengumuman tentang acara penyerahan. Namun, tidak ada dokumen yang bisa dilihat oleh warga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada laporan dan intruksi yang diperlukan untuk akuntabilitas. Pelaporan yang baik menunjukkan tanggung jawab pemerintah kepada publik dan tata kelola yang sehat, menurut teori akuntabilitas dan transparansi. Tidak adanya dokumentasi membuat pengelolaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis.¹²⁸

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan bantuan beras miskin Desa Lojejer belum sepenuhnya mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bukti kelemahan tata kelola adalah ketidakterbukaan informasi, ketidakteraturan distribusi, dan kurangnya dokumentasi. Semua kekurangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belum berdasarkan nilai-nilai moral dan ketuhanan.

Menurut akuntansi spiritual, pengelolaan bantuan adalah jenis amanah yang harus dijalankan dengan cara yang adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.¹²⁹

b. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD)

¹²⁸ Batubara, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal."

¹²⁹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lojejer ini yang pertama yaitu dalam pelaksanaan penyaluran Raskin dari gudang Bulog hingga Titik Distribusi di balai desa menjadi tanggung jawab penuh Bulog. Pemerintah desa hanya bertugas menyiapkan tempat dan mengatur teknis pendistribusian. Dalam pelaksanaannya, distribusi dilakukan setiap bulan, tetapi waktu dan kuantitas bisa berubah tergantung kondisi wilayah seperti cuaca atau musim panen.

Selanjutnya yang kedua, biasanya beras yang dikirim dalam karung dengan logo Bulog berisi seberat 10-15 kg. Pemerintah desa menerima jadwal distribusi dari kecamatan dan kemudian menyesuaikannya untuk didistribusikan kepada warga. Kualitas beras diperiksa sebelum pembagian, dan berita acara serah terima dibuat sebagai bukti formal saat serah terima dilakukan di TD.

Selanjutnya yang ketiga yaitu rencana penyaluran. Dalam pelaksanaan ini, RT/RW memainkan peran penting dalam memanggil warga, memastikan identitas mereka, dan menjaga distribusi tertib.

Orang yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh anggota keluarga mereka. Keterlambatan jadwal dan kondisi beras yang kadang-kadang tidak layak konsumsi adalah masalah umum. Sebenarnya, pelaksanaan seperti ini sudah mencerminkan niat baik (ihsan) dari pelaksana. Namun, prinsip keadilan dan tanggung jawab spiritual belum sepenuhnya terwujud karena belum ada sistem yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Selanjutnya Mekanisme penyaluran, yang pertama berdasarkan pagu raskin, yang menerbitkan SPA kepada Perum Bulog untuk mendistribusikan beras sesuai alokasi yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara ditemukan bahwa pihak desa menjelaskan bahwa Perum Bulog lah yang awal terlebih dahulu menerbitkan SPA sebelum bantuan di salurkan.

Prosedur yang kedua, penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak desa memastikan dengan adanya pengeluaran bantuan tersebut untuk memastikan bahwa beras dapat didistribusikan secara langsung.

Ketiga penyaluran beras. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak desa melakukan pengawasan penuh agar nantinya bantuan tersebut dapat sampai ke penerimanya sesuai dengan jumlahnya. Pihak desa bekerja sama untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Keempat pengecekan kualitas beras. Hasil wawancara ditemukan bahwa pihak desa melakukan pengecekan langsung terhadap beras sebelum di bagikan. Apakah beras tersebut layak dan bagus untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Selain itu, agar KPM yang menerimanya merasa puas oleh beras yang didapat karna hasil berasnya yang cukup bagus dan layak untuk di konsumsi.

Kelima serah terima beras. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak desa melakukan serah terima karena hal ini sangat penting

dilakukan guna sebagai acuan untuk pertanggungjawaban distribusi.

Terakhir penyaluran raskin secara rutin. Namun, prosedur-prosedur yang sudah dijelaskan diatas ini terdapat kekurangan yang dimana ditemukan dalam proses penyaluran masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Beberapa warga mengatakan mereka tidak mendapatkan bantuan secara teratur dan tidak tahu mengapa. Hasil ini diperkuat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita Nur Radeana dkk., yang menemukan bahwa banyak desa masih belum siap untuk mengelola bantuan.¹³⁰ Selain itu, prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab harus mendasari pengelolaan bantuan. Di Desa Lojejer, nilai-nilai ini belum sepenuhnya diterapkan.

c. Kriteria Penerima Raskin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seseorang yang menerima bantuan tersebut harus tergolong masyarakat yang kurang mampu. Hasil wawancara dari Kepala Desa dan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjelaskan bahwa kriteria penerima yang termasuk diantaranya :

1. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
2. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp.1.500.000.
3. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
4. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian.

¹³⁰ Juwita Nur Radeana et al., "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance."

5. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang).
6. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu.
7. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang.
8. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
9. Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus
10. Sumber air sumur masih menimba atau manual
11. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.

Dari hasil penelitian ditemukan data yang digunakan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi warga secara aktual, banyak warga miskin yang tidak terdaftar, sementara beberapa warga yang tidak layak mendapatkan bantuan karena datanya belum diperbarui. Secara akuntansi spiritual, ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip keadilan dan amanah. Ketika warga yang sangat membutuhkan tidak konsisten terdaftar, sistem belum memenuhi rasa keadilan sepenuhnya.¹³¹

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juwita Nur

¹³¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, dan Agustin Dwi Haryanti yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*” yang meneliti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses penyebaran bantuan sosial. Namun ada perbedaan dalam subjek penelitian.¹³² Yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” bahwasanya meneliti bantuan sosial berupa beras di Desa Lojejer sedangkan penelitian terdahulu meneliti dan fokus pada BLT-DD di Desa Sentul Kabupaten Pasuruan. Selain itu pada penelitian yang sekarang hasilnya proses pendataan dan distribusi dalam penelitian ini masih dilakukan secara manual dan kurang terdokumentasi dengan baik. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan sistem pencatatan yang lebih terorganisir dan rapi.¹³³

Dalam buku Darwan Sari, Muhammad Idham Handa,

Ustianti,Hasjad, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” disebutkan bahwa beberapa faktor memengaruhi kinerja pengelolaan bantuan, termasuk kekurangan infrastruktur, kekurangan instruksi manajemen keuangan, dan ketidakjelasan. Selain itu, buku tersebut menjelaskan beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan bantuan. Ini termasuk pencairan yang tertunda,

¹³² Juwita Nur Radeana et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance.”

¹³³ Juwita Nur Radeana et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance,” *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (October 1, 2024): 206–207, <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

kurangnya koordinasi lintas sektor, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjamin tata kelola yang adil dan transparan. Menurut teori ini, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pengelolaan bantuan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya pengelolaan bantuan masih menghadapi masalah seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, dan kurangnya pertanggungjawaban yang optimal dalam penyebaran bantuan. Untuk membuat pengelolaan bantuan lebih adil dan efisien, transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan meskipun perangkat desa dan pemangku kepentingan sudah terlibat.¹³⁴

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siswanto Diki yang berjudul “Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.” Bahwa hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat dengan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan BLT-DD. Masyarakat diberi kesempatan untuk mempelajari dan memantau bagaimana bantuan didistribusikan. Berbeda dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Bahwa

¹³⁴ Darwan Sari et al., *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Penerbit NEM, 2025), 145.

hasilnya sebagian besar tidak mengetahui proses seleksi penerima bantuan secara rinci, dan informasi hanya tersebar dari mulut ke mulut tanpa pengumuman resmi. Oleh karena itu, temuan perbandingan ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan di Desa Lojejer masih menghadapi masalah akuntabilitas. Ini terutama terkait dengan pendataan yang tidak akurat, pelaporan yang tidak terbuka, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi bantuan.¹³⁵

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer

a. Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer

Transparansi ini menurut teori Lukviarman berarti akses informasi yang terbuka dan mudah di fahami. Namun hasil temuan penelitian di Desa Lojejer ini sebagian besar penerima manfaat mengaku tidak mengetahui proses pendataan. Seringkali, informasi tidak terbuka tentang siapa yang menerima bantuan, kapan bantuan diberikan, dan berapa banyak yang diterima. Dalam kebanyakan kasus, hanya RT atau tetangga yang dapat memberika informasi. Hingga mereka menerima undangan tiba-tiba, warga bahkan tidak tahu apakah mereka masih terdaftar. Pemerintah desa juga tidak mempublikasikan laporan pasca-distribusi. Berkas laporan hanya disimpan secara internal lalu dikembalikan ke pos, dan tidak diumumkan secara terbuka agar tidak terjadi kegaduhan antar warga. Secara akuntansi spiritual, transparansi menyentuh aspek amanah dan

¹³⁵ Diki, “Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covi 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.”

ihsan. Ketika informasi hanya disimpan oleh aparat desa dan tidak dibagikan secara adil kepada masyarakat, maka ada ketimpangan akses yang berpotensi menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Selanjutnya hasil temuan wawancara mendalam yang dilakukan di Desa Lojejer menunjukkan bahwa ada beberapa masalah penting yang memengaruhi kinerja pengelolaan bantuan beras. Permasalahan ini muncul dari berbagai sumber, termasuk pemerintah desa, RT/RW, dan warga penerima manfaat. Ini adalah 5 hasil utama :

1) Kurangnya Keterbukaan Informasi Terkait Pendataan Penerima

Sebagian besar warga, termasuk KPM sendiri, tidak tahu bagaimana mereka dapat terdaftar sebagai penerima bantuan. Informasi yang seharusnya dibuka tidak pernah diberikan. Setelah menerima undangan dari RT, mereka baru tahu bahwa mereka akan mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam akuntansi spiritual belum diterapkan dan transparansi substantif belum diterapkan. Dalam kenyataannya, masyarakat kehilangan hak untuk memahami proses yang secara langsung memengaruhi kemakmuran mereka.

2) Penyaluran Tidak Merata dan Tidak Konsisten

Mereka-mereka yang dianggap mampu seperti memiliki mobil dan rumah permanen secara rutin menerima bantuan, tetapi mereka yang dianggap miskin tidak sering atau bahkan tidak menerima sama sekali. Kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan

terhadap aparat desa muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian ini. Karena bantuan tidak sampai pada orang yang benar-benar membutuhkannya, distribusi seperti ini melanggar prinsip keadilan dan amanah dari sudut pandang spiritual. Ini menunjukkan kelemahan dalam evaluasi dan distribusi data.

3) Tidak Ada Sosialisasi Terbuka atau Laporan Publik

Pemerintah desa tidak memberi tahu orang-orang secara terbuka siapa yang berhak mendapatkan bantuan, bagaimana distribusi terjadi, atau cara mengelola data. Semua informasi dikirim melalui mulut ke mulut, seringkali oleh RT, dan tidak ada dokumentasi yang tersedia untuk umum. Bahkan kepala desa memutuskan untuk menghindari kecemburuan sosial dengan mengembalikan laporan dan data ke pihak pos setelah pembagian langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban publik, yang merupakan bagian dari nilai tauhid dan ihsan, di mana para pengelola diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan jujur dalam pekerjaan mereka.

4) Keterlibatan Masyarakat Masih Rendah

Dari hasil penelitian ditemukan baik proses validasi data maupun forum evaluasi tidak melibatkan masyarakat. Tidak pernah ada rapat atau pertanyaan yang diajukan kepada warga. Meskipun demikian, kepercayaan publik dan tanggung jawab kolektif berasal dari partisipasi masyarakat dalam proses sosial. Dalam akuntansi

spiritual, partisipasi aktif masyarakat termasuk dalam praktik ihsan, yaitu bekerja dengan niat baik untuk menciptakan keberkahan dan keadilan sosial. Jika masyarakat tidak terlibat, pengelolaan bantuan menjadi elitis dan menutup ruang kontrol sosial yang baik.

5) Belum Adanya Mekanisme Laporan yang Diumumkan ke Publik

Tidak ada laporan terakhir yang diumumkan kepada masyarakat setelah distribusi selesai. Semua laporan dikembalikan ke pos, dan desa tidak menyimpan apapun dari laporan tersebut. Selain itu, RT tidak memiliki informasi apapun selain data yang diperoleh dari pusat. Ini berarti masyarakat tidak dapat memastikan apakah bantuan diberikan dengan cara yang adil. Tidak adanya laporan publik menunjukkan kurangnya akuntabilitas baik di tingkat horizontal maupun vertikal. Dalam akuntansi spiritual, kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat, Tuhan, dan diri kita sendiri. Transparansi dan dokumentasi yang jelas bukan hanya tanggung jawab administratif, mereka juga merupakan tanggung jawab moral dan ibadah.

Dari penjelasan diatas peneliti sudah menjelaskan bahwa pengelolaan bantuan beras di Desa Lojejer masih memiliki beberapa masalah, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketidakkonsistenan distribusi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sistem informasi yang tidak terbuka menunjukkan

bahwa prinsip-prinsip spiritual belum sepenuhnya diterapkan. Karena tidak ada dokumentasi yang transparan, kepercayaan belum dijaga sepenuhnya. Keadilan belum tercapai karena tidak ada penelitian ulang terhadap data lama. Karena pelaporan hanya bersifat formal, bukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat, tauhid belum terinternalisasi. Karena tidak ada niat sistematis untuk membangun mekanisme pengawasan bersama masyarakat, ihsan tidak terlihat. Oleh karena itu, sistem manajemen ini perlu diperbaiki agar manajemen bantuan tidak hanya administratif tetapi juga berdasarkan nilai spiritual yang berpusat pada keadilan sosial dan keberkahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Silfiana Lazulfa yang berjudul “Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”¹³⁶ dan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi dan kauntabilitas Dalam

Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” hasilnya sudah selaras. Bahwa dalam pengelolaan bantuan sosial di desa ini sama-sama transparansinya belum sepenuhnya diterapkan. Keterbukaan tersebut tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, bentuk pertanggungjawaban bantuan sosial tidak diberitahukan secara

¹³⁶ Aulia Silfiana Lazulfa, “Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1* (2024): 1.

terbuka kepada masyarakat. Pemerintah desa sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik namun tidak keseluruhan, diharapkan pemerintah desa lebih kompeten agar tidak terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihsanul Windasari yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam” Hasilnya bahwa dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren sudah dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga amanah. Dalam pengelolaannya sudah terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” dalam objek yang berbeda untuk pengelolaan bantuan sosial ini belum terbuka ke semua pihak yang berkepentingan.¹³⁷

Dari hasil pembahasan diatas menurut Iwan Triyuwono, transparansi memiliki nilai amanah dan ihsan dalam akuntansi spiritual. Ketimpangan akses menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik jika informasi hanya dimiliki oleh aparat desa dan tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat. Menurut perspektif spiritual, transparansi bukan hanya

¹³⁷ Windasari, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.”

menyampaikan informasi, itu berarti juga menyampaikan dengan niat yang benar, jujur, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan.¹³⁸

b. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer

Dalam manajemen pemerintah daerah, akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi spiritual dalam konteks bantuan beras di Desa Lojejer. Selanjutnya akuntabilitas sendiri ada 4 indikator yaitu :

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum mengacu pada seberapa ketat pengelola bantuan tunduk pada peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa administrasi bantuan beras Desa Lojejer masih belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan hukum dan kejujuran. Sebagian warga menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dalam data antara warga miskin yang seharusnya menerima bantuan dan warga yang sebenarnya menerimanya. Bahkan, ditemukan bahwa beberapa penerima bantuan berasal dari keluarga yang mampu, tetapi orang miskin yang layak tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada kesalahan dalam laporan dan pelaksanaan program bantuan. Dalam jurnal windasari berpendapat

¹³⁸ Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, dan Teori), Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

bahwa akuntabilitas Islam harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan amanah, selain laporan administratif. Ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan moral ini menyebabkan penyalahgunaan kewajiban publik yang seharusnya dijaga.

2) Akuntabilitas Proses

Tujuan akuntabilitas proses adalah untuk memastikan bahwa mekanisme dan prosedur yang digunakan selama distribusi berfungsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa distribusi dilakukan tanpa pembaruan data rutin, dan tim pendistribusi tidak memiliki prosedur operasional standar (SOP) tertulis yang jelas. Keputusan RT dan Kepala Dusun membuat penetapan penerima tanpa musyawarah terbuka atau masyarakat. Menurut Pratiwi et al., sistem informasi dan prosedur yang diatur dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, akuntansi spiritual juga menekankan betapa pentingnya proses yang dilakukan secara jujur dan terbuka.

3) Akuntabilitas Program

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, tujuan program bantuan beras ini adalah membantu masyarakat miskin.

Namun, program ini belum dilaksanakan secara merata untuk membantu warga miskin. Ada warga yang mengatakan bahwa bantuan hanya diterima oleh orang-orang tertentu, beberapa bahkan mengatakan bahwa penerima ditentukan karena mereka dekat

dengan aparat desa. Hal ini diperkuat dalam teori akuntansi spiritual, akuntansi program yang ideal seharusnya mendukung prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Teori ini menekankan bahwa setiap pengelolaan harus mengedepankan ihsan dan keadilan, bukan semata-mata administratif.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Dari sisi kebijakan, banyak orang yang tidak tahu mengapa mereka memilih penerima bantuan. Tidak ada sosialisasi kebijakan yang terbuka, masyarakat bahkan tidak tahu kepada siapa mereka harus melaporkan ketidakadilan mereka. Ini menunjukkan kekurangan akuntabilitas kebijakan. Menurut Radeana et al., kebijakan pengelolaan bantuan sosial harus dibuat dengan melibatkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat dan kepada Allah SWT.

Selanjutnya temuan di Desa Lojejer juga menunjukkan bahwa masih ada praktik pengelolaan bantuan yang belum sepenuhnya akuntabel dan adil, seperti tidak konsistennya pendataan dan kurangnya kejelasan kriteria penerima. Dalam teori akuntansi spiritual pengelolaan seperti ini seharusnya dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT.¹³⁹ Seperti dijelaskan , hubungan antara Sang Pencipta

¹³⁹ Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori), Edisi kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)..

dan yang diciptakan adalah suatu hubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Ketika pengelolaan bantuan memiliki kesadaran spiritual dan rasa cinta kepada Allah., maka sikap amanah, jujur, dan adil akan muncul dengan sendirinya. Prinsip ini penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak, bukan berdasarkan kedekatan sosial atau kepentingan lain.¹⁴⁰

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Tiwi Bastari Batubara, Yenni Samri Juliati Nasution, Nursantri Yanti yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, bahwa hasilnya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dan diterapkan dengan baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecama Wuluhan Kabupaten Jember” Bahwasanya dalam

pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan belum sempurna.¹⁴¹

¹⁴⁰ Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Good Governance Zakat*, vol. 01 (LP3DI Press, 2017), 150.

¹⁴¹ Batubara, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember secara garis besar didistribusikan dari pemerintah pusat ke daerah sebelum sampai ke desa melalui Bulog. Namun, dalam praktiknya, beberapa langkah mekanisme tidak berjalan dengan baik, dan ditemukan kendala bahwa proses pendataan tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, ada warga miskin yang tidak terdata, dan warga yang dianggap mampu justru menerima bantuan. Bantuan tidak selalu diberikan secara teratur setiap bulan, dan beberapa penerima mengaku tidak tahu kapan diberikan. Tidak ada sistem pelaporan yang jelas kepada masyarakat, baik melalui musyawarah terbuka maupun dokumentasi.
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember untuk transparansinya dalam pengelolaan bantuan beras miskin tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Informasi tentang distribusi bantuan masih kurang diketahui masyarakat. Banyak orang yang menerima bantuan tidak tahu bagaimana

dan apa yang diperlukan untuk menerima bantuan. Selain itu, proses pelaporan distribusi bantuan kepada masyarakat umum tidak dilakukan secara aktif. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer juga belum maksimal. Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait pelaksanaan distribusi bantuan belum sepenuhnya dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada publik. Berdasarkan analisis dengan pendekatan akuntansi spiritual, pengelolaan bantuan beras seharusnya berlandaskan nilai-nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam situasi ini, pemerintah desa harus bertanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan melanggar nilai-nilai spiritual dalam pelayanan publik.

B. Saran

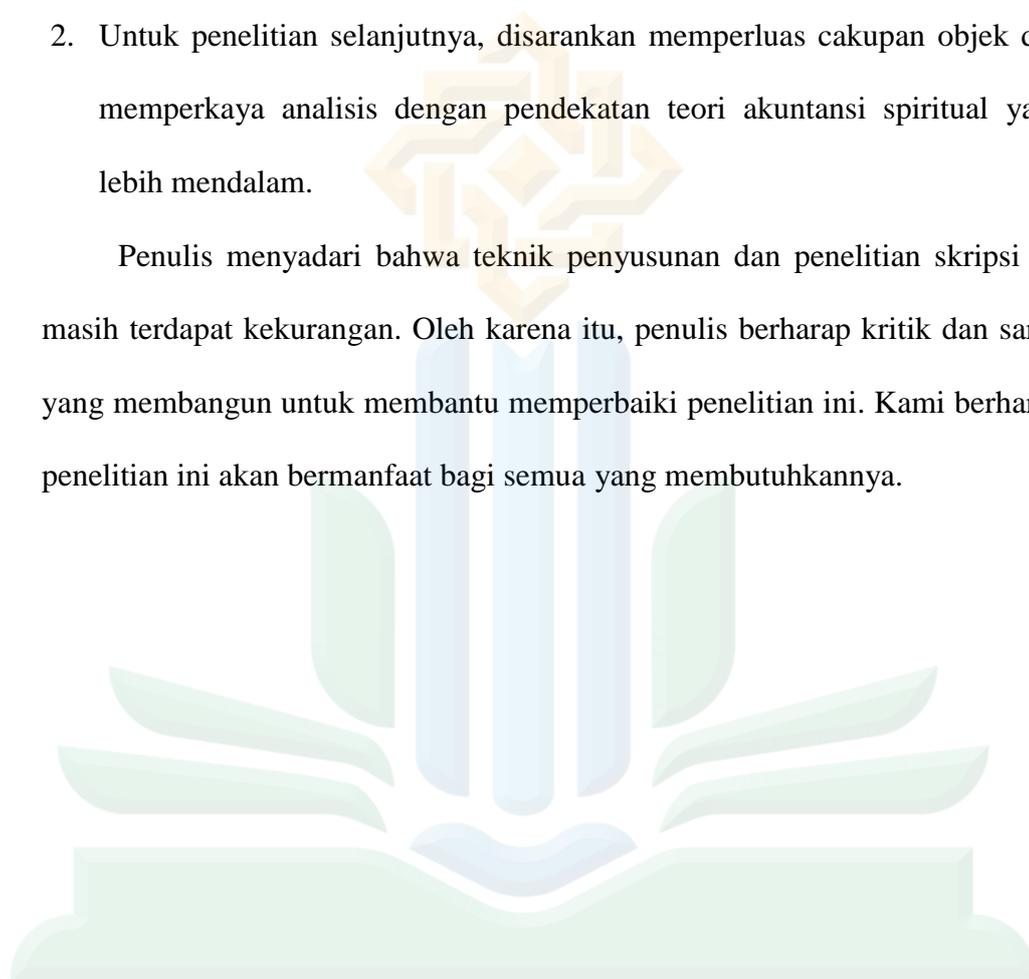
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diberikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Pemerintah Desa Lojejer agar meningkatkan pendataan penerima bantuan secara berkala, memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi pendistribusian

bantuan, sehingga pengelolaan bantuan beras miskin dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan objek dan memperkaya analisis dengan pendekatan teori akuntansi spiritual yang lebih mendalam.

Penulis menyadari bahwa teknik penyusunan dan penelitian skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk membantu memperbaiki penelitian ini. Kami berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- A, Asnita. “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2024.
- Aliffia, Elok Rizky. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Antuala, Samsul, Asda Rauf, and Yuliana Bakari. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Distribusi Raskin Di Desa Modelomo Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo.” *Jurnal Ilmiah Agribisnis* 6 (2021).
- Arwani, Agus, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyan Andiyan. “The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution.” *International Journal Of Professional Business Review*, 2022.
- Asmoro, Wiwiek Kusumaning, and Novie Astuti Setianingsih. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ‘Prodamas’ Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri.” *Owner* 3, no. 2 (July 31, 2020): 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>.
- Batubara, Tiwi Bastari. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 12, no. 2 (June 28, 2023): 138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>.
- Briando, Bobby, Muhamad Ali Embi, Triyuwono Iwan, and Gugus Irianto. “Tuah Sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 (2020).
- Bulog. “Program Beras Untuk Keluarga Miskin.” [Http://bulog.go.id/](http://bulog.go.id/), h. 6., September 25, 2020.

- Diki, Siswanto. "Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Pandemi Covi 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022.
- Fauzan, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 9, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.
- Fauzan, Nurul Setianingrum, Nur Ika Mauliya, and M.F. Hidayatullah. *Etika Bisnis & Profesi*. Indigo Media, 2023.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Garis Khatulistiwa Makassar, 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Irfansyah, Ahmad, Candra Romanda, and Rano Asoka. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 6, no. 2 (July 9, 2023): 236. <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i2.288>.
- Julianti, Muhammad Salim, and Nurliani. "Efektivitas Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Pada Rumahtangga Miskin Di Desa Katangka. Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa." *Jurnal, Agribisnis. Umi.Ac.Id* 3 (2020).
- Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, and Agustin Dwi Haryanti. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance." *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (October 1, 2024): 206–20. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.
- Lazulfa, Aulia Silfiana. "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1 (2024): 1.
- Lestari, Diah Puji. "Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Rezti's Batik Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Lomi, Rambu Riniati. "Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin

(Raskin) (Studi Di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu).” Skripsi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, 2023.

Lukviarman. *Corporate Governance. PT Era Adicitra Intermedia*. Solo Mahsun, Moh., Sulistyowati F dan Purwanugraha, Heribertus A. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.: Akuntansi Sektor Publik, 2016.

Manguntara, La. “Efektivitas Pengelolaan Program Beras Sejahtera Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna.” *Nautical, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (2022). <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i8.414>.

Marwah, Gama. “Akuntansi Sebagai Realitas : Spiritual Accounting Dalam Paradigma Naturalistik (Studi Pada PT Biota Laut Ganggang).” Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-34. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nurisma, Yeni. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah).” Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

“Pedoman Umum (Pedum) Raskin,” 2018.

“Petunjuk Teknis Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Kabupaten Rembang Tahun 2007.” Kabupaten Rembang, 2007.

Pratiwi, Ana, Dhira Ervina Safitri, Listiana Windi Artika, and Dewi Lailatul Zahra. “Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Proses Pembuatan Kontrak Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember.” *Penamas: Journal of Community Service* 3, no. 1 (June 30, 2023): 51–57. <https://doi.org/10.53088/penamas.v3i1.604>.

Raba, Manggaukang. *Administrasi Konsep Dan Implementasi*. Malang : UMM Press, 2020.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami. *Good Governance Zakat*. Vol. 01. LP3DI Press, 2017.

Rakhmawati, Dra. Ratih, Dwi Oktavia Ariyanti, and Wiwik Fitria Ningsih. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” 1 (2023): No 1.

Rastuti, Dina. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.

Ristiana. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang).” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2022.

Rizky Arief Fadhillah, Kamilah, and Mawaddah Irham. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (January 28, 2024): 38–47. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>.

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (December 24, 2022): 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

Sari, Darwan, Muhamad Idham Handa, Ustianti, and Hasjad. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Penerbit NEM, 2025.

Sarmila, Sarmila, Udin B. Sore, and Natsir Tompo. “Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.” *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 1, no. 1 (January 30, 2022): 14–21. <https://doi.org/10.56326/jp.v1i1.1371>.

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2018.

Sutikno, Bambang. “Analisis Efektivitas Distribusi Raskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga Di Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 15 (2020). <https://doi.org/10.62128/jiads.v15i16.10>.

Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Jember, UIN KHAS Jember Press, 2021, n.d.

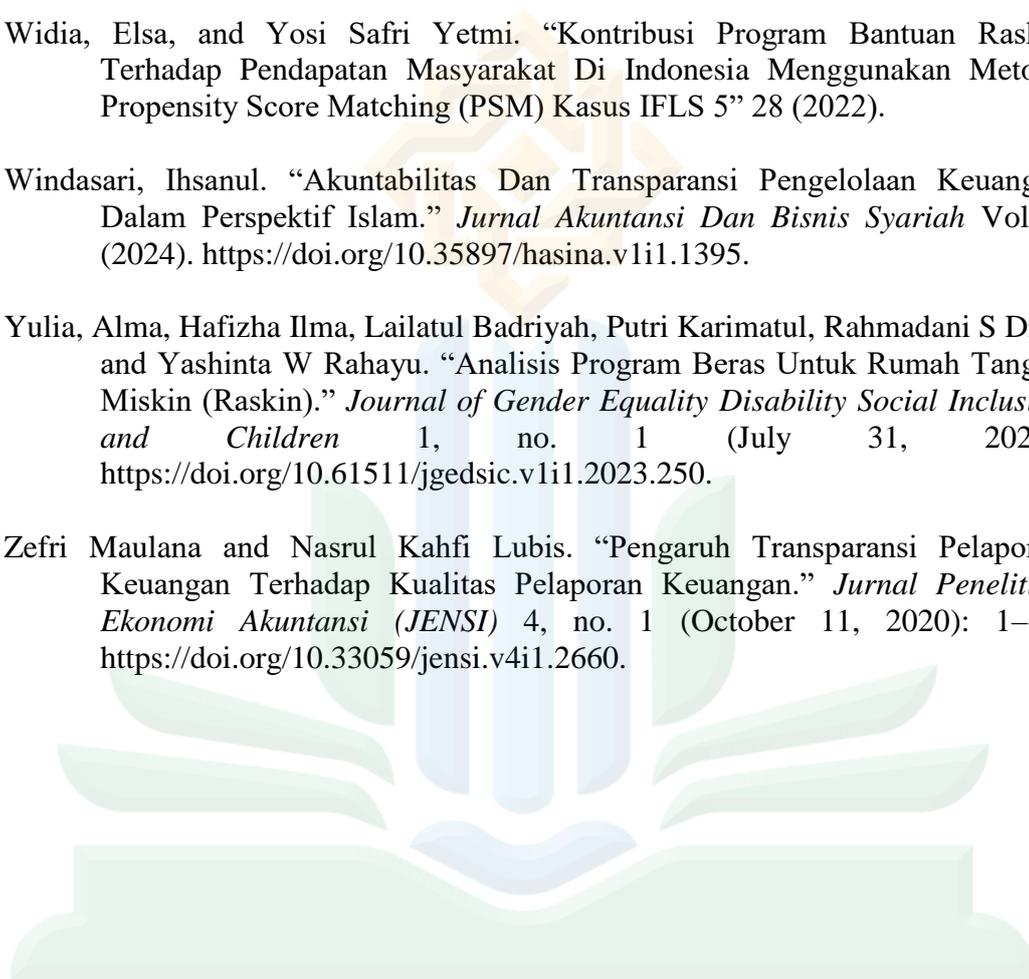
Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*. Edisi kedua. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Widia, Elsa, and Yosi Safri Yetmi. “Kontribusi Program Bantuan Raskin Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Indonesia Menggunakan Metode Propensity Score Matching (PSM) Kasus IFLS 5” 28 (2022).

Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol. 1 (2024). <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.

Yulia, Alma, Hafizha Ilma, Lailatul Badriyah, Putri Karimatul, Rahmadani S Dila, and Yashinta W Rahayu. “Analisis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).” *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children* 1, no. 1 (July 31, 2023). <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i1.2023.250>.

Zefri Maulana and Nasrul Kahfi Lubis. “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 4, no. 1 (October 11, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2660>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Bantuan Beras Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Bantuan Beras Miskin 2. Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan Beras Miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember 2. Bagaimana Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara 2. Data Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Jurnal c. Internet d. Buku e. Skripsi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendekatan Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitatif 4. Jenis Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif 5. Teknik Pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Kondensasi Data c. Penyajian Data d. Penarikan Kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan beras miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENY TRI AGUSTINA LESTARI
NIM : 214105030034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 22 Mei 2025
Saya Yang Menyatakan



RENY TRI AGUSTINA L
NIM. 214105030034

PEDOMAN WAWANCARA

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Beras Miskin

1. Bagaimana alur distribusi bantuan beras dari pemerintah sampai ke warga desa?
2. Apa saja tahapan yang dilakukan sebelum bantuan diserahkan ke penerima?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan ini?
4. Bagaimana cara memastikan bahwa bantuan diterima oleh warga yang benar benar berhak?
5. Setelah pembagian selesai apakah desa membuat laporan penanggungjawaban?

B. Transparansi Pengelolaan Bantuan

1. Apakah informasi mengenai daftar penerima bantuan diumumkan secara terbuka?
2. Bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi soal jadwal dan pembagian bantuan?
3. Apakah warga bisa menyampaikan keluhan atau protes soal pembagian bantuan?
4. Apakah warga mengetahui terakait data-data penerima bantuan dan laporan terakait bantuan ini?

C. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan

1. Apakah ada laporan atau bentuk pertanggungjawaban atas distribusi bantuan ini?

2. Kepada siapa laporan atau pertanggungjawaban itu disampaikan?
3. Jika ada masalah seperti penerima tidak tepat sasaran, bagaimana penyelesaiannya?
4. Apakah pengelolaan bantuan ini sudah dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab?

D. Wawancara Dengan KPM Dan Warga Yang Bermasalah Dalam Menerima Bantuan

1. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan secara rutin setiap bulan?
2. Apakah jumlah dan kualitas beras sesuai dengan yang dijanjikan?
3. Apakah ada informasi yang jelas tentang jadwal dan mekanisme pembagian?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengadu ke pihak desa dan bagaimana tanggapannya?
5. Pernahkan Bapak/Ibu merasa ada ketidaksesuaian atau ketidakadilan dalam pembagian bantuan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-109/Un.22/7.a/PP.00.11/2024 18 Desember 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Lojejer beserta Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Lojejer Kepel,
 Lojejer, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, Jawa Timur 68162

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Reny Tri Agustina Lestari
 NIM : 214105030034
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember di Lingkungan atau Lembaga Wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA LOJEJER

Jln.Sultan Agung No.07 tlp. 081230215300 Lojejer Wuluhan-Jember kpos 68162
email: lojejerkita@gmail.com Blog: lojejerkita.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/02/35.09.11.01/2025.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang tersebut dibawah ini :

<i>N a m a</i>	: RENEY TRI AGUSTINA L
<i>Jenis kelamin</i>	: Perempuan
<i>Tempat tgl lahir</i>	: Jember, 12 Agustus 2002
<i>A g a m a</i>	: Islam
<i>Nim</i>	: 214105030034
<i>Jurusan/Prodi</i>	: Akuntansi Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Desa kami mulai tanggal 25 Februari 2025 sampai 05 Mei 2025. Dengan judul skripsi “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan bantuan Beras Miskin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.”

Demikian Surat Keterangan di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lojejer, 05 Mei 2025
Kepala Desa,

Mohamad Sholeh
MOHAMAD SHOLEH,SH,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan

JURNAL KEGIATAN

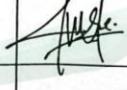
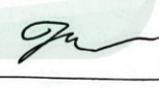
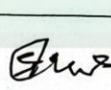
Nama : Reny Tri Agustina L

Nim : 214105030034

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras Miskin di

Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Lokasi : Kantor Desa Lojejer

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 25 Februari 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
2.	Rabu, 26 Februari 2025	Wawancara Dengan Kepala Desa	
3.	Kamis, 27 Februari 2025	Wawancara Dengan Kepala Seksi Kesejahteraan	
4.	Jum'at, 28 Februari 2025	Wawancara Dengan Sekretaris Desa	
5.	Senin, 03 Maret 2025	Wawancara Dengan KPM Ibu Suyati	
6.	Selasa, 04 Maret 2025	Wawancara Dengan KPM Bapak Solikin	
7.	Selasa, 04 Maret 2025	Wawancara Dengan Warga Yang Bermasalah Dalam Menerima Bantuan Ibu Misirah	
8.	Rabu, 05 Maret 2025	Wawancara Dengan Warga Yang Bermasalah Dalam Menerima Bantuan Bapak Suwanto	
9.	Senin, 05 Mei 2025	Meminta Surat Selesai Penelitian	

Jember, 05 Mei 2025
 Kepala Desa Lojejer

 Muhammad Sholeh

DOKUMENTASI

1. Pelaksanaan pembagian bantuan beras miskin kepada masyarakat



2. Menyerahkan surat izin penelitian



3. Wawancara dengan Sekretaris Desa



4. Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan



5. Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



6. Wawancara dengan warga yang bermasalah dalam menerima bantuan



Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Reny Tri Agustina Lestari
 NIM : 214105030034
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Beras miskin di desa Lojejer Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hi. Mariyah Ulfah, M.EI)
 NIP. 197709142005012004



Surat Keterangan Naskah Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

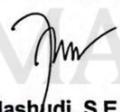
Nama : Reny Tri Agustina Lestari
 NIM : 214105030034
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025
 Pembimbing


Mashudi, S.E.I., M.E.I
 NUP. 201603134



Surat Keterangan Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Reny Tri Agustina Lestari
 NIM : 214105030034
 Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 Mei 2025
 Koordinator Prodi Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak
 NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Reny Tri Agustina Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Agustus 2002
NIM : 214105030034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Dusun Demangan, Desa Kesilir, RT/RW 002/013,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Email : renitriagustin779316@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Burhan Al-Jauhari Kesilir : 2007-2009
2. SD Negeri Kesilir 01 : 2009-2015
3. SMP 02 Islam 45 Ambulu : 2015-2018
4. SMA Negeri Jenggawah : 2018-2021
5. UIN KHAS Jember : 2021-2025